



RENCANA KERJA TH. 2026



Disusun Oleh :
**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KAB. TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur




ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Sub Koordinator



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yang disusun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 2025 – 2029 yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan yang meliputi urusan pemerintah di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang dirumuskan dengan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Renstra, pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Temanggung, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud Dan Tujuan.	11
1.4. Sistematika Penulisan.	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKPPP	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	46
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	46
2.2.2 Data Pokok	68
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKPPP	107
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	109
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	123
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	123
2.7. Penghargaan.....	124
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	126
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	126
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPPP	126
BAB IV. RENCANA KERJA dan PENDANAAN	131
4.1. Program dan Kegiatan.....	131
BAB V. PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan s.d Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja DKPPP TW II Tahun 2025	32
Tabel 2.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja DKPPP Tahun 2025.....	45
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung.....	47
Tabel 2.5. Skor Pola Pangan Harapan.....	69
Tabel 2.6. Skor pola pangan harapan konsumsi pangan penduduk	72
Tabel 2.7. Capaian Rasio Ketersediaan Pangan	73
Tabel 2.8. Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan ...	74
Tabel 2.9. Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	75
Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan TW II	76
Tabel 2.11. Capaian Nilai Produksi Perikanan Tahun 2019-2025 TW II.....	76
Tabel 2.12. Tingkat Produktivitas Ikan (Budidaya).....	77
Tabel 2.13. Produksi Ikan Konsumsi (Budidaya).....	78
Tabel 2.14. Persentase nelayan perairan umum yang terbina	79
Tabel 2.15. Data Nelayan perairan umum terbina Tahun 2023.....	80
Tabel 2.16. Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan	81
Tabel 2.17. Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di Perairan Umum	82
Tabel 2.18. Rekap penebaran dan nelayan yang terbina	82
Tabel 2.19. Capaian Angka Konsumsi Ikan	83
Tabel 2.20. Capaian Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB	86

Tabel 2.21. Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan	86
Tabel 2.22. Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura	88
Tabel 2.23. Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan	90
Tabel 2.24. Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung	93
Tabel 2.25. Produktivitas Ternak Unggas	94
Tabel 2.26. Presentase Kelahiran Pedet	97
Tabel 2.27. Capaian Persentase Penanganan penyakit Hewan	98
Tabel 2.28. Laporan Jumlah Kasus	98
Tabel 2.29. Capaian presentase Peningkatan Pengawasan Produk Hewan	101
Tabel 2.30. Sampel Organ Hati.....	102
Tabel 2.31. Capaian Kinerja TW I 2024	103
Tabel 2.32. Capaian Kinerja TW I Tahun 2023	104
Tabel 2.33. Jumlah Kelompok tani yang naik kelas TW I Tahun 2024	111
Tabel 2.34. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	112
Tabel 2.35. Usulan program dan kegiatan masyarakat	123
Tabel 2.36. Daftar Inovasi Perangkat daerah 2021-2023.....	123
Tabel 2.37. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	124
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	128
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2025	131
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2025	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

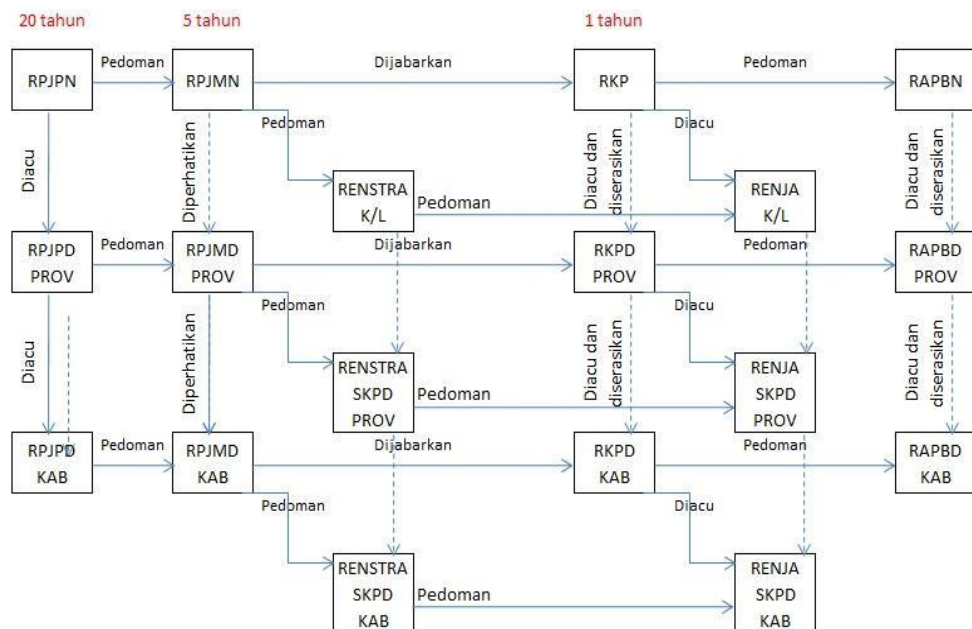
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan , pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan .

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DKPPP untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DKPPP.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DKPPP. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DKPPP dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DKPPP tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DKPPP;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DKPPP;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DKPPP sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DKPPP tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DKPPP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DKPPP;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DKPPP;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DKPPP;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DKPPP.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DKPPP.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DKPPP.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DKPPP merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Penyempurnaan rancangan Renja DKPPP perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DKPPP dengan saran dan masukan dari

stakeholder terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DKPPP dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DKPPP yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DKPPP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DKPPP Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi DKPPP Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DKPPP untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKPPP.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DKPPP Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DKPPP selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DKPPP Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DKPPP Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DKPPP Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DKPPP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DKPPP Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja DKPPP Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2024 terhadap capaian Renstra DKPPP Tahun

2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DKPPP sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025**, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKPPP
s.d Tahun 2024

KODE	BIDANG/		INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGE T AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
	PROGRAM/		PROGRAM/KE GIATAN		K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV					
	KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2			4	5	6	9	11		13	14	15	16	17	18	19	20,00	21	22	23, 00
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	1				-		24.597.8 61.392		4.828.4 41.924		7.950.96 7.585		5.759.38 7.771		5.753.52 0.105	0,00	24.292.3 17.385		98, 76
				%			10 0		25		25		25		25		100,00		100 ,00	
2.09.01																				
2.09.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.158.4 29.632		4.364.0 25.612		7.416.85 1.565		5.202.77 9.682		4.934.13 4.196	0,00	21.917.7 91.055		
2.09.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			14	22.158.42 9.632	3	4.364.02 5.612	5	7.416.851 .565,00	3	5.202.779 .682	3	4.934.134 .196	14,00	21.917.79 1.055	100	98, 91
2.09.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							208.500. 000		25.557. 019		31.113.0 99		51.390.0 43		90.472.8 50		198.533. 011		
2.09.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan	Paket			12	25.000.00 0	3	-	3	9.436.500	3	3.670.000	3	11.841.90 0	12,00	24.948.40 0	100, 00	99, 79

			Kantor yang Disediakan																
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	60.000.000	3	9.408.000	3	4.941.000	3	18.731.000	3	26.562.500	12,00	59.642.500	100,00	99,40
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	13.500.000	3	1.510.000	3	1.875.000	3	4.734.000	3	5.374.000	12,00	13.493.000	100,00	99,95
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	55.000.000	3	6.731.000	3	8.793.000	3	14.424.000	3	24.789.000	12,00	54.737.000	100,00	99,52
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	55.000.000	3	7.908.019	3	6.067.599	3	9.831.043	3	21.905.450	12,00	45.712.111	100,00	83,11
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000		0		0		-		5.000.000		5.000.000		
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000							50	5.000.000	50,00	5.000.000	75,00	50,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.697.876.760		394.230.968		398.213.568		426.103.952		445.389.699		1.663.938.187		

2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	1.000.000	3	-	3	500.000	3	58.000	3	400.000	12,00	958.000	100,00	95,80
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	135.000.000	3	29.923.031	3	29.368.768	3	30.263.652	3	29.825.899	12,00	119.381.350	100,00	88,43
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.561.876.760	3	364.307.937	3	368.344.800	3	395.782.300	3	415.163.800	12,00	1.543.598.837	100,00	98,83
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						523.055.000		44.628.325		104.789.353		79.114.094		278.523.360		507.055.132		
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12	156.055.000	3	36.153.325	3	23.554.153	3	33.565.594	0	49.147.415	9,00	142.420.487	100,00	91,26
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		20	322.000.000		-	3	76.935.200	3	39.058.500	0	203.963.945	6,00	319.957.645	100	99,37

2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit			25	45.000.000	3	8.475.000	3	4.300.000	3	6.490.000	16	25.412.000	25,00	44.677.000	100,00	99,28
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	98,08	92,59
																	Predikat	Sangat tinggi	Sangat tinggi
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						0		0		0						0		
		Rasio ketersediaan pangan	%	100		100		100		120,1		105,5		90,20		90,20		90,20	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	90	
																	Predikat	Tinggi	
2.09.04.2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						20.000.000		0		0		-		18.979.500		18.979.500	100,00	94,90

			Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100		100		100	-	100		100,00		100,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	20.000.000					1	18.979.500,00	1	18.979.500	100,00	94,90
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	94,90
															Predikat	Sangat tinggi	Sangat tinggi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1			0	20.000.000		0		0	-		19.749.800		19.749.800		98,75
			Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90		100	-	100	98,15	98,37		98,37		100,00	98,75
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	20.000.000					1,00	19.749.800	1,00	19.749.800	100,00	98,75

																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 ,00	98, 75
																		Predikat	San gat ting gi	San gat ting gi
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						200.000. 000		136.817 .000		12.801.9 00		-		47.983.2 50		197.602. 150			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1			0		0		0		0						-			0
			Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	10, 00	10, 00		4,5 9		23, 3		48,5 3		59,0 8		59,08			100 ,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1			0		200.000. 000		136.817 .000		12.801.9 00		-		47.983.2 50		197.602. 150			98, 80
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	6,2 0	1,2		1,2 1		1,21		1,21		1,2 1		1,21			100 ,00	
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	13, 80	12, 6		12, 5		12, 60		12,6		12, 6		12,60			100 ,00	
3.25.04.2. 02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					5	145.000.0 00	5	136.817. 000	0	3.181.900	0	-	0,00	4.993.800		144.992.7 00			
3.25.04.2. 02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	Kelomp ok		5	145.000.0 00	5	136.817. 000		3.181.900				4.993.800	5,00	144.992.7 00	100, 00		99, 99

			Pengembangan Kapasitas																
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						55.000.000		-		9.620.000		-		42.989.450		52.609.450		
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		1	45.000.000		-		0		-	1,00	42.609.450	1,00	42.609.450	100	94,68
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		1	10.000.000	0,25	-	0,25	9620000	0,25	-	0,25	380.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	98,22
																	Predikat	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1			0		0		0		0						-		
			Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	33,00	10		45		48,28		48,5		21,4		21,40		100,00	
																	Rata-rata capaian		

																	kinerja kegiatan		
																	Predikat		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						27.154.251.243		51.071.250		7.229.225.918		6.822.336.089		11.508.609.543		25.611.242.800		94,32
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1			0		18.045.020.343		18.707.250		7.128.233.600		3.833.242.919		6.221.240.168		17.201.423.937		95,33
			Produktivitas padi	kwintal /ha	61,75	61,25		61,6		61,5		61,5		61,49		61,49		100,00	
			Produktivitas jagung	kwintal /ha	54,7	54,5		56,9		56,6		56,8		57,60		57,60		100,00	
			Produktivitas bawang putih	kwintal /ha	61,25	60,5		65		74,19		73,02		73,02		73,02		100,00	
			Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	70	68		76		76,85		76,47		76,50		76,50		100,00	
			Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	51	50		75		75,00		75		75,00		75,00		100,00	
			Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	66	65		76		76,00		76		76,00		76,00		100,00	
			Produktivitas tembakau	kwintal / ha	6,2	6,2		6,56		6,56		6,7		6,70		6,70		100,00	
			Produktivitas kopi robusta	kwintal / ha	7,2	7,1		6,53		6,53		7,5		7,44		7,44		100,00	
			Produktivitas kopi arabika	kwintal / ha	6,5	6,5		6,5		5,75		6,75		5,51		5,51		84,84	
			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,6	177,4		177,6		177,6		177,6		177,60		177,60		100,00	

			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,72		13,7		13,71		13,71		13,71		13,71		100,00			
			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,72		13,7		13,71		13,71		13,71		13,71		100,00			
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		100,00			
			Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		2,72		5,44		10,88		10,88		100,00			
			Persentase angka kelahiran pedet	Kg/Ekor	56,5		55,5		166,2		172,3		48,30		48,30		87,03			
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							14.710.020.343		11.843.500		7.122.619.050		3.788.023.269		3.255.132.518		14.177.618.337		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan			1		13.500.120.343	0,25	10.178.500	0,25	7.104.767.650	0,25	3.240.005.535	0,25	2.731.601.152	1,00	13.086.552.837	100	96,94
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan			1		1.209.900.000	0,25	1.665.000	0,25	17.851.400	0,25	548.017.734	0,25	523.531.366	1,00	1.091.065.500	100	90,18

3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						3.335.000.000		6.863.750		5.614.550		45.219.650		2.966.107.650		3.023.805.600		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB		55000	25.000.000	0	825.500		2.025.000		6.300.000	55000	15.663.000	55000,00	24.813.500	100	99,25
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		1	3.310.000.000	0,25	6.038.250	0,25	3.589.550	0,25	38.919.650	0,25	2.950.444.650	1,00	2.998.992.100	95	90,60
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	98,75	94,24
																	Predikat	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1				0	8.107.730.900		0		20.644.318		2.324.311.870		5.086.153.610		7.431.109.798		91,65
			Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100				100,00		100,00		100		100,00	-	100	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						15.000.000		0		0		-		14.905.000		14.905.000		

3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota				1	15.000.000		0		0		-	1	14.905.000		14.905.000	100,00	99,37
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						8.092.730.900		0		20.644.318		2.324.311.870		5.071.248.610		7.416.204.798		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit			19	5.059.415.000,00	0			10.776.534		1.239.951.719	19	3.331.904.243	19	4.582.632.496	100	90,58
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan JalanUsaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			4	844.105.000	0	-		6.682.784,00		495.973.769	4	340.281.826	4	842.938.379	100	99,86
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				130.000.000	2	-		-		-		-	0	-	10,00	0,00
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisas	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	Unit			1	2.059.210.900	0		0,25	3.185.000	0,25	588.386.382	0,5	1.399.062.541	1,00	1.990.633.923	100,00	96,67

	i Rumah Potong Hewan	Direhabilitasi dan Dipelihara																	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	82,00	95,70
																	Predikat	Tinggi	Sangat tinggi
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1			0		751.500.000		8.068.000		24.142.000		524.583.150		175.154.165		731.947.315		97,40
			Persentase penanganan penyakit hewan	%	89	85		95,8		97,57		97,39			97,43	97,57		100,00	
			Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	79	70		85,23		86,54		84,62			82,41	82,41		100,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000		4.271.000		23.742.000		11.464.400		37.104.600		76.582.000		95,73

3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan		1	80.000.000	0,25	4.271.000	0,25	23.742.000	0,25	11.464.400	0,25	37.104.600	1,00	76.582.000	98	95,73
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						671.500.000		3.797.000		400.000		513.118.750		138049565		655.365.315		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		1023	671.500.000		3.797.000		400.000		513.118.750		138.049.565	1023,00	655.365.315	98	97,60
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	98,00	96,66
																	Predikat	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1					0		0		0						-		
			Persentase fasilitas pengendalian bencana pertanian	%	43	41		109,29		94,03			96,17		99,23	99,23		100,00	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	

																		Predikat	San gat ting gi	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1					250.000. 000		24.296. 000		56.206.0 00		140.198. 150		26.061.6 00		246.761. 750		98, 70	
			Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,3			1,4 8		1,48			1,48		1,4		1,40		100 ,00	
3.27.07.2. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						250.000. 000		24.296. 000		56.206.0 00		140.198. 150		26.061.6 00		246.761. 750		98, 70	
3.27.07.2. 01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		20	250.000.0 00	5	24.296.0 00	5	56.206.00 0	5	140.198.1 50	5	26.061.60 0	20,00	246.761.7 50	100	98, 70	
																		Rata- rata capaian kinerja kegiatan	100 ,00	98, 70
																		Predikat	San gat ting gi	San gat ting gi
			Jumlah				51.992.1 12.635		5.016.3 30.174		15.192.9 95.403		12.581.7 23.860		17.348.8 42.198		50.139.8 91.635			

																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	97,10	96,22
								2										PREDIKAT	Sangat tinggi	Sangat tinggi
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	98,54	96,36
																		PREDIKAT	Sangat tinggi	Sangat tinggi

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan s.d Triwulan II Tahun 2025

KODE	BIDANG/		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		REALISASI 2024		TARGET 2025		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
	PROGRAM/		PROGRAM/KEGIATAN								I		II		III		IV					
	KEGIATAN				K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1			-	100	24.292.3 17.385		26.958.1 57.009		6.673.65 8.203		6.376.29 2.039	0	0	0,00	13.049.9 50.242		48,4 1
2.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN	1			-	100	24.292.3 17.385		26.958.1 57.009		6.673.65 8.203		6.376.29 2.039	0	0	0,00	13.049.9 50.242		48,4 1
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						24.292.3 17.385		26.494.8 60.009		6.673.65 8.203		6.261.44 8.039	-	-		12.935.1 06.242		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.917.7 91.055		24.247.9 68.309		6.141.88 6.125		5.927.89 7.168	-	-	0,00	12.069.7 83.293		49,7 8
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		14	21.917.7 91.055	14	24.247.9 68.309	4	6.141.886 .125,00	5	5.927.897 .168,00	-		8,00	12.069.7 83.293	50	49,7 8
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.533. 011		128.088. 000		12.167.3 97		12.046.6 26	-	-		24.214.0 23		18,9 0
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	24.948.4 00	12	10.500.0 00	3	-	3				6,00	-	50,0 0	0,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	59.642.5 00	12	37.628.0 00	3	-	3				6,00	-	50,0 0	0,00

2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	13.493.000	12	6.000.000	3	80.000	3	2.516.000				50,00	2.596.000	50,00	43,27
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	54.737.000	12	48.960.000	3	5.842.500	3	2.813.000				6,00	8.655.500	55,00	17,68
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	45.712.111	12	25.000.000	3	6.244.897	3	6.717.626				6,00	12.962.523	55,00	51,85
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		0		0		0	-	-			-		
2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun	Unit			5.000.000	1	-	0	-						0,00	-	-	#DIV/0!
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.663.938.187		1.860.990.800		504.532.671		276.898.491	-	-			781.431.162		41,99
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	958.000	12	1.500.000	3	500.000		-				3,00	500.000	40,00	33,33
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		12	119.381.350	12	130.000.000	3	29.125.067	3	27.551.810				6,00	56.676.877	50,00	43,60

		yang Disediakan																		
2.09.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n		12	1.543.59 8.837	12	1.729.49 0.800	3	474.907.6 04	3	249.346.6 81					6,00	724.254. 285	50,0 0	41,8 8
2.09.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					507.055. 132		257.812. 900		15.072.0 10		44.605.7 54	-		-			59.677.7 64		23,1 5
2.09.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12	142.420. 487	38	123.412. 900	5	15.072.01 0	5	29.607.90 8					10,00	44.679.9 18	50,0 0	36,2 0
2.09.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit		12	-	13	20.000.0 00	0	-							2,00	-	10,0 0	0,00
2.09.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit		12	319.957. 645	10	100.000. 000	3		2	9.597.846					5,00	9.597.84 6	40	9,60

2.09.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit		12	44.677.0 00	23	14.400.0 00	0	-	3	5.400.000				10,00	5.400.00 0	40,0 0	37,5 0
																	Rata- rata capaian kinerja kegiatan	45,3 8	34,5 2
																	Predikat	San gat ren dah	San gat rend ah
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							0		0							0		
		Rasio ketersediaan pangan	%	10 0	90, 48		10 0		100		179, 95					100,00		100, 00	
																	Rata- rata capaian kinerja kegiatan	100	
																	Predikat	San gat ting gi	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN					-		300.000. 000		0		111.450. 000	-		0		111.450. 000	100, 00	37,1 5

	PANGAN MASYARAKAT																				
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						-		300.000.000		0		111.450.000	-	-			111.450.000			
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan			12	-	1	300.000.000	0,2	-	0,5	111.450.000			0,50		111.450.000	50,00	37,15	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	50,00	37,15	
																		Predikat	Sangat rendah	Sangat rendah	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						18.979.500		163.297.000	0	0	0	3.394.000	0	0	0	0	20	3.394.000	100,00	2,08
		Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100		100,00		100		100		100					100,00	-	100,00		

2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						-		13.297.000		0		0		-	-		-		
2.09.03.2.04.0002	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun	Dokumen		12	-	1	13.297.000		-	0,5					0,50	-	15,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						18.979.500		150.000.000		-		3.394.000	-	-	-	20	3.394.000	35	-
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	58,00	18.979.500	100	150.000.000			20	3.394.000				20,00	3.394.000	35,00	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	15,00	0,00
																		Predikat	Sangat rendah	Sangat rendah
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1			0		19.749.800		0		0							-		#DIV/0!

			Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90		98,37		90		98,373 9837		71,43					71,43	-	79,37	#DIV/0!
2.09.05 2.01.000 7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						19.749.800												Rata-rata capaian kinerja kegiatan	79,37	#DIV/0!
																			Predikat	Tinggi	#DIV/0!
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						197.602.150		144.665.170		760.000		122.301.400	-	-				123.061.400		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1			0		0		0		0								-		0
			Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	10,00		59,08		10,00		2,65		6,12 245					2,65	0	26,50	
																			-		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1			0		197.602.150		137.023.670		760.000		121.146.400	-	0				121.906.400		88,97
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	1,40		1,21		1,3		1,3		1,3					1,30	-	100,00	
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	12,80		12,60		12,7		12,7		12,70					12,70	-	100,00	

3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						144.992.700		127.023.670		760.000		120.853.900	-	-		121.613.900		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok		1	144.992.700	5	127.023.670	0,0058	760.000,00		120.853.900			4,00	121.613.900	96,00	95,74
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						52.609.450		10.000.000		0		292.500	-	-		292.500		
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		12	10.000.000	1	10.000.000	0,4715	-	0,5	292500			0,50	292.500	47,15	2,93
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						42.609.450										Rata-rata capaian kinerja kegiatan	71,58	49,33
																	Predikat	Sedang	Sangat rendah
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1				0	0		0		0						-		
			Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	10,00	21,43		10		26,47		-61,76				26,47058824		100,00	

																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100, 00	
																			Predikat	San gat ting gi	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1			0		0		7.641.50 0		0		1.155.00 0	-	0			1.155.00 0			
			Angka Konsumsi Ikan (AKI)	g/kap/ tahun	22, 97		22, 25		22, 52		22,27										
3.25.06.2. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								7.641.50 0		0		1.155.00 0	-	-			1.155.00 0			
3.25.06.2. 03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Ton		12	-	11 93 5	7.641.50 0	96	-		1155000				60,00	1.155.00 0	60,0 0	15,1 1	
																		Rata- rata capaian kinerja kegiatan	60,0 0	15,1 1	
																		Predikat	Ren dah	San gat	

																			rendah
3.27 URUSAN	URUSAN PEMERINTAHAN AN BIDANG PERTANIAN						25.611.2 42.800		27.301.4 90.357		46.775.2 60	4,19	10.273.9 01.875	-	-		10.320.6 77.135		37,8 0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1			0		17.201.4 23.937		19.375.6 73.157		19.270.3 00	2	8.909.83 2.300				8.929.10 2.600		46,0 8
			Produktivitas padi	kwintal /ha	61, 75	63, 15		61, 5		61,49		63,4 2					62,0999 999		100, 00
			Produktivitas jagung	kwintal /ha	54, 7	46, 10		54, 6		57,6		55,1					55,1		100, 00
			Produktivitas bawang putih	kwintal /ha	61, 25	69, 16		61		73,02		71,4 896					72		100, 00
			Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	70	81, 00		69		76,50		71,2					70,68		100, 00
			Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	51	76, 36		50, 5		75,0		72,5 0					72,15		100, 00
			Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	66	79, 04		65, 5		76		73,5 1					73,2		100, 00
			Produktivitas tembakau	kwintal / ha	6,2	6,6 8		6,2		6,7		6,7					72,15		100, 00
			Produktivitas kopi robusta	kwintal / ha	7,2	7,4 4		7,1 5		7,44		7,44					7,48		100, 00
			Produktivitas kopi arabika	kwintal / ha	6,5	5,5 1		6,5		5,51		5,51					5,55		84,8 4
			Produktivitas ternak sapi	Kg/Eko r	17 7,6	177 ,60		17 7,5		177,6		177, 6					177,6		100, 00
			Produktivitas ternak domba	Kg/Eko r	13, 72	13, 71		13, 71		13,71		13,7 1					13,71		100, 00

		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,72		13,71		13,71		13,72		13,71					13,72		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,7500002		0,75					0,75		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		10,88		2,72		5,4403					2,72		25,00	
		Persentase angka kelahiran pedet	Kg/Ekor	56,5		48,33		56		58,419958		37,7444					58,42		100,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							14.177.618.337		13.711.497.807		16.142.500	1	8.907.435.150	0	0	0	0	0	8.923.577.650
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		1	13.086.552.837	1	11.934.513.607	0,1	15.442.500	0,75	8.906.302.650					0,75	8.921.745.150	75	74,76
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		1	1.091.065.500	1	1.776.984.200	0,01	700.000	0,03	1.132.500					0,03	1.832.500	25	0,10
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan					3.023.805.600		5.664.175.350		3.127.800	1	2.397.150	0	0	0	0	55	5.524.950		

	Kabupaten/Kota																					
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB			1	24.813.500	2	10.000.000	0	0	1					50,00	-	20	0,00	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen			1,00	2.998.992.100	1	5.654.175.350	0,01	3.127.800		2.397.150				5,00	5.524.950	5	0,10	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	31,25	24,99	
																			Predikat	Sangat rendah	Sangat rendah	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1				0		7.431.109.798		4.024.847.400		800.000	2	6.878.102	0	0	0	0	1	7.678.102		0,19
			Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100		100,00		100		100		100,00					100,00	-	100		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian							14.905.000		284.875.400		0	1	1.728.500	0	0	0	0	1	1.728.500		

3.27.03.2.01.0015	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kot a	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Dokum en				14.905.000	1	284.875.400	0	0	0,61	1.728.500					0,61	1.728.500	12,00	0,61
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						7.416.204.798		3.739.972.000		800.000	1	5.149.602	0	0	0	0	1	5.949.602		
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit				-	4	848.260.000	0,05	-	0,25						0,25	-	3	0,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				842.938.379	4	0	0	-							0	-	0	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				-	3	235.000.000	0	-	0,25						0,25	-	15,00	0,00
3.27.03.2.02.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			1,00	4.582.632.496	20	2.651.740.000	0,05	800.000,00	0,25	4.549.852					0.25	5.349.852	12,00	0,20
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisa si Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit			1,00	1.990.633.923	1	4.972.000	0,2	-	0,25	599.750					0,25	599.750	55,00	12,06

[illegible]

	Dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
3.27.04.2.01.0008	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan			1,00	76.582.000	20	54.724.800	0,03	1.571.150,00	5,00	7.158.000					5,00	8.729.150	41.65	15,95
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							655.365.315		398.725.000		3.785.120	-	247.116.225	-	-	-	-	-	250.901.345		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan			1,00	655.365.315	10800	398.725.000	1050	3.785.120,00		247.116.225					0,00	250.901.345	70	62,93
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	70,00	39,44
																				Predikat	Sedang	Sangat rendah
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	1						0		0		0								-		

[illegible]

																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	47,50	30,77
																			Predikat	Sangat rendah	Sangat rendah
			Jumlah					35.928.350.879		54.404.312.536		6.721.193.463		16.772.495.314					23.495.927.777		
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANG KAT DAERAH		67.705.738.476										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANG KAT DAERAH	48,28	30,91
							PREDIKAT												PREDIKAT	Sangat rendah	Sangat rendah
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANG KAT DAERAH												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANG KAT DAERAH	91,40	#DIV/0!
							PREDIKAT												PREDIKAT	Sangat tinggi	#DIV/0!

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DKPPP Tahun 2024-2026.

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 31 indikator, terdiri dari:
 - a. Skor Pola pangan Harapan
 - b. Tingkat konsumsi ikan
 - c. Tingkat Ketersediaan energi perkapita
 - d. Tingkat ketersediaan protein perkapita
 - e. Tingkat ketersediaan lemak perkapita
 - f. Nilai Produksi Perikanan
 - g. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
 - h. Rasio Ketersediaan Pangan
 - i. Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan
 - j. Persentase penanganan kerawanan pangan
 - k. Rasio Lumbung Pangan ,asyarakat
 - l. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman
 - m. Produktivitas Ikan Nila
 - n. Produktivitas Ikan Lele
 - o. Produktivitas Ikan Mas
 - p. Persentase nelayan perairan umum yang terbina
 - q. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan
 - r. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan
 - s. Angka Konsumsi Ikan (AKI)
 - t. Produktifitas Padi
 - u. Produktifitas Jagung
 - v. Peningkatan produktifitas Ubi kayu
 - w. Produktifitas Bawang Putih
 - x. Produktifitas Bawang Merah

- y. Produktifitas Bawang Cabai Rawit
- z. Produktifitas Bawang Cabai Besar
- aa. Produktivitas Tembakau
- bb. Produktivitas Kopi Robusta
- cc. Produktivitas cengkeh
- dd. Produktivitas vanili
- ee. Produktivitas ternak sapi
- ff. Produktivitas ternak domba
- gg. Produktivitas ternak kambing
- hh. Produktivitas ternak ayam pedaging
- ii. Produktivitas ternak ayam petelur
- jj. Produktivitas ternak ayam buras
- kk. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama
- ll. Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya
- mm. Persentase penanganan penyakit hewan
- nn. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
- oo. Persentase pengendalian bencana pertanian
- pp. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa DKPPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **99,01**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sasaran Program	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1.	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulan dan kemandirian pangan	0	90,2	90,2	Disupport kegiatan APBN, APBD I
2.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	94,90	100	6,1	Disupport kegiatan APBN, APBD I
3.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	98,75	100	1,25	Disupport kegiatan APBN
4.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
5.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	98,80	100	1,2	Disupport kegiatan APBN
6.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
7.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
8.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	94,32	98,29	3,97	Disupport kegiatan APBN, APBD I
9.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	91,65	100	8,35	Disupport kegiatan APBN, APBD I
10.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	97,40	100	2,6	Disupport kegiatan APBN, APBD I
11.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
12.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	98,70	100	1,3	Disupport kegiatan APBN, APBD I
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	98,76	98,76	2,4	
	Rata-rata	96	99,01	3,01	

Dari Tabel 2.1. dan Tabel 2.2 Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DKPPP dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DKPPP Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																	
		1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,5	78,5	78,7	79	89,43	89,43		100					
INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100	100	90,5	179,951		100,0					
				jumlah beras yang tersedia (kg)					47.997.681	47.649.029,4336							
				jumlah penduduk					817.483,00	822.880,00							
				indeks konsumsi beras perkapita perhari					0,177780822	0,177780822							
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	na	100	100	100	100	100		100					
				jumlah kerawanan pangan yang tertangani					20	20							
				jumlah total laporan kerawanan pangan					20	20							
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	90	98,37	71,43		79,3650794					
				Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman					121	5							
				jumlah sampel yang diambil					123	7							
JUMLAH IKUPD			1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD								100	0	0	0	0	0

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								93,1	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PANGAN			4	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PANGAN								96,5608 466	0	0	0	0	0
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN																	
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																	
		1	Nilai Produksi Perikanan	JUTA Rp		349.36 4	349.50 0	349.63 8	248.894.21 3,88	154.924, 79		44,3275 517					
				Nilai Produksi ikan budidaya													
				Nilai Produksi ikan tangkap dalam 1 tahun													
INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	10	10	10	59,08	6,12		61,2244 898					
				jumlah nelayan terbina						579	60						
				jumlah nelayan						980	980						
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	Produktivitas ikan nila	kg/m2	6	1,2	1,3	1,4	1,21	1,30		100					
				Jumlah produksi ikan nila (kg)						3.001.737	1.754.53 5						
				luas kolam (m2)						2.490.942	1.348.98 5						
		3	Produktivitas ikan lele	kg/m2	14	12,6	12,7	12,8	12,60	12,70		100					
				Jumlah produksi ikan lele (kg)						4.607.505	2.622.61 7						
				luas kolam (m2)						365.644	206.485						
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	4	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	10	10	10	21,4	-61,8		-6,18					
				jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n						34	13						
				jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-1						28	34						
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapit a/tahun	na	22,08	22,52	22,97	22,25	22,27		98,9					
				Jumlah konsumsi di Rumah Tangga													
				Jumlah Konsumsi diluar rumah tangga													

				Konsumsi tidak tercatat												
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						44,33	0	0	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						70,7875 79	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PERIKANAN				6	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERIKANAN						57,56	0	0	0	0	0
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																
		1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22,94	23,38	23,3	23,25	22,94	22,94		98,45				
				Jumlah PDRB Sektor Pertanian					6174016,36	6174016,36						
				Jumlah PDRB					26912324,21	26912324,21						
INDIKATOR PROGRAM																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Produktivitas padi	Kuintal/ha	63,3	61,25	61,5	61,75	61,49	63,42		100				
				Total Produksi					910.222,00	833.185,00						
				luas panen					14.802,00	13.136,60						
		2	Produktivitas jagung	Kuintal/ha	46	54,5	54,6	54,7	57,6	55,1		100				
				Total Produksi					360.574,00	369.214,00						
				luas panen					6.264,00	6.700,80						
		3	Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	71,41	60,5	61	61,25	73,02	71,48961578		100				
				Total Produksi					96312	68.845						
				luas panen					1319	963						
		4	Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	76,65	68	69	70	76,50	71,20		100				
				Total Produksi					212631,8	158.634						
				luas panen					2779,5	2.228,00						

	5	Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ ha	75,5	50	50,5	51	75,0	72,5		100					
			Total Produksi					568762	420282, 5							
			luas panen					7583,5	5797							
	6	Produktivitas cabai besar	Kuintal/ ha	77,53	65	65,5	66	76	73,5079 1827		100					
			Total Produksi					285798	204.697, 50							
			luas panen					3760,5	2.785							
	7	Produktivitas tembakau	Kuintal/ ha	6,8	6,2	6,2	6,2	6,70	6,70		100					
			Total Produksi					94389,6	94389,6							
			luas panen					14088	14088							
	8	Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ ha	7,25	7,1	7,15	7,2	7,44	7,44		100,00					
			Total Produksi					83.294,36	83.294,3 6							
			luas panen					11193,972	11193,9 72							
	9	Produktivitas kopi arabika	Kuintal/ ha	7	6,5	6,5	6,5	5,51	5,51		84,84					
			Total Produksi					6492,8818	6492,88 18							
			luas panen					1177,33	1177,33							
	10	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,6	177,4	177,5	177,6	177,6	177,60		100					
			Jumlah produksi karkas sapi pertahun					804.609,00	549.757, 00							
			Jumlah sapi dipotong pertahun					4.761,00	3.253,00							
			konstanta					8,6	8,6							
	11	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71	13,7	13,71	13,72	13,71	13,71		100					
			Jumlah produksi karkas domba pertahun					255.285,00	322.853							
			jumlah domba dipotong pertahun					18.910,00	23.915,0 0							
			konstanta					0,21	0,21							
	12		Kg/Ekor	13,71	13,7	13,71	13,72	13,71	13,71		100					

2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Produktivitas ternak kambing	Jumlah produksi karkas kambing pertahun					11.772,00	10.138,50						
				jumlah kambing dipotong pertahun					872	751						
				konstanta					0,21	0,21						
		13	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		100				
				Jumlah produksi karkas ayam pedaging pertahun					6.218.437,50	3.129.375						
				jumlah ternak dipotong pertahun					8.291.250,00	4.172.500						
		14	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	5,44		50				
				Jumlah produksi ayam petelur pertahun					8.215.172,00	4.161.826						
				Jumlah populasi ternak pertahun					755.030	765.000						
		15	Persentase kelahiran pedet	%	na	55,5	56	56,5	48,3	37,74		67				
				JUmlah Aseptor IB					3.077,00	1.330,00						
				Jumlah Kelahiran Pedet					1.487,00	502						
		16	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	na	100	100	100	100	100		100				
				Jumlah Prasarana yang dimanfaatkan					70	70						
				Jumlah prasarana yang dibangun					70	70						
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	90	85	87	89	97,43	99,17		100				
				Jumlah Penanganan Kasus Penyakit Hewan					1.023,00	1075						
				Jumlah laporan kasus penyakit hewan					1.050,00	1084						
		18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	75	77	79	214,00	79,45		100				
				Jumlah usaha produk hewan yang memenuhi syarat					260,00	638						
				jumlah usaha produk hewan dan produk asal hewan yang dipantau					2.001,00	803						

4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	na	41	42	43	99,23	97,38		100,00					
				Jumlah luasan tertangani					981,55	494,85							
				Jumlah luasan terpapar					989,202	508,15							
5	Program Penyuluhan Pertanian	20	Presentase Kelompok Tani yang naik kelas	%	0,98	1,3	1,3	1,3	1,40	1,40		100					
				Jumlah Kelompok tani naik kelas					45	45							
				Total Jumlah Kelompok tani					3205	3205							
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							98,45	0	0	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				20	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							95,11	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PERTANIAN				21	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERTANIAN							96,78	0	0	0	0	0
JUMLAH IKUPD				3	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							80,93	0	0	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				28	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							86,34	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH				31	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH							83,63	0	0	0	0	0

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 28 terdiri dari:

a. Rasio ketersediaan pangan.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perubahan iklim menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian serta masih kurangnya pengetahuan dan sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan di tingkat masyarakat
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan produksi pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin kualitas bahan pangan sesuai standar.

b. Persentase penanganan kerawanan pangan

Faktor pendorong indikator ini adalah

1. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
2. Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan
3. Adanya bantuan sara dan prasarana pertanian kepada kelompok tani
4. Potensi diversifikasi pangan lokal

Faktor penghambat indikator ini adalah

1. Ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, dimana lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas

2. Adanya iklim ekstrim memicu terjadinya pergeseran masa tanam/pola tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan
3. Keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor
4. Fluktuasi harga pangan
5. Foodloss dan waste yang tinggi

Rekomendasi tindak lanjut:

1. Pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin
2. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial
3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat tentang menu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
4. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan pelatihan olahan pangan berbahan baku lokal
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, peternakan kecil dan perikanan untuk ketersediaan pangan keluarga dan menambah pendapatan keluarga.
6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan diversifikasi tanaman pada kelompok tani, untuk meningkatkan

pendapatan kelompok tani dengan optimalisasi lahan pertanian sehingga dapat menambah produksi yang akhirnya menambah pendapatan.

c. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pestisida non kimiawi untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, sarana uji tes yang kurang
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan edukasi dan alih teknologi tentang penggunaan dan pembuatan pestisida non kimiawi untuk pelaku budidaya pertanian khususnya PSAT.

d. Persentase nelayan perairan umum yang terbina

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikn
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan

e. Produktivitas ikan nila

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah intensifikasi budidaya belum maksimal karena, kualitas pakan menurun(harga pakan cenderung terus naik), kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun, tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar, perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan (meningkatkan serangan penyakit)
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara teratur, tidak melebihi kebutuhan pasar dan penerapan 4 T (Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu)

f. Produktivitas ikan lele

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah intensifikasi budidaya belum maksimal karena, kualitas pakan menurun(harga pakan cenderung terus naik), kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun, tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar, perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan (meningkatkan serangan penyakit)
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara teratur, tidak melebihi kebutuhan pasar dan penerapan 4 T (Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu)

mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu)

g. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat akan restocking ikan di perairan umum dengan mengajukan proposal untuk penebaran benih ikan di wilayahnya
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan anggaran pengadaan benih ikan untuk ditebar di perairan umum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk swadaya pengadaan benih ikan untuk ditebar di perairan umum

h. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Faktor Pendukung Indikator AKI adalah melaksanakan kegiatan:

- a. Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) pada masyarakat
- b. Penyaluran bantuan sarana dan prasara pengolahan kepada Poklahsar untuk meningkatkan produksi

Faktor Penghambat Indikator AKI adalah:

- a. Rendahnya minat konsumsi ikan segar pada Masyarakat
- b. Tingginya harga bahan baku olahan ikan dan turunnya daya beli masyarakat

Rekomendasi Tindak Lanjut Indikator AKI:

- a. Diversifikasi produk olahan ikan yang dilakukan oleh Poklahsar
- b. Menjaln kerjasama dengan warung/ toko dan sekolah berasrama /pondok pesantren untuk pemasaran produk, bahan baku diambil langsung dari pembudidaya

i. Produktivitas padi

Faktor pendorong indikator tersebut adalah iklim tahun ini sudah tidak lagi diwarnai El Nino seperti tahun 2023, juga sinergi program yang mendukung peningkatan produksi pangan, seperti peningkatan kuota pupuk subsidi, pelaksanaan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketersediaan air (pompanisasi).

Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua petani menggunakan varietas unggul baru dan benih berlabel, penggunaan benih lokal masih cukup tinggi.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan kesadaran petani dalam penggunaan varietas unggul baru, melaksanakan budidaya yang baik dan benar, melaksanakan kampanye tanam padi.

j. Produktivitas jagung

Faktor pendorong indikator tersebut adalah iklim tahun ini sudah tidak lagi diwarnai El Nino seperti tahun 2023, juga sinergi program yang mendukung peningkatan produksi pangan, seperti peningkatan kuota pupuk subsidi, bantuan benih jagung hibrida yang dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Faktor penghambat indikator tersebut adalah meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (hama ulat) pada fase vegetatif tanaman jagung seiring dengan masuk musim kemarau.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan berpedoman pada prinsip pengendalian hama terpadu (hayati, mekanis dan kimia).

k. Produktivitas bawang putih

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kegiatan bantuan dari Pemerintah dalam menciptakan kemadirian pangan untuk komoditas hortikultura baik itu melalui APBN maupun APBD. Dan penerapan Teknologi budidaya (GAP, GHP) yang semakin berkembang. kegiatan pemurnian benih bawang geol untuk memenuhi kebutuhan petani (varietas unggul asli temanggung)
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh perubahan iklim, kualitas benih, terbatasnya stok benih unggul lokal, fluktuasi harga jual yang terlalu tinggi
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta.

l. Produktivitas bawang merah

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang merah baik itu melalui APBN, APBD I dan APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor iklim
- 2) Serangan OPT
- 3) Kualitas benih
- 4) Penanganan pasca panen yang belum benar
- 5) Adanya fluktuasi harga

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga terutama pada saat panen raya, melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani
- Adanya pelatihan/BIntek tentang penanganan pasca panen dan pengolahan pasca panen

m. Produktivitas bawang putih

Faktor Pendorong :

- Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi
- Adanya kegiatan pemurnian benih bawang geol (bawang lokal unggul Temanggung)

Faktor Penghambat :

- Faktor iklim
- Serangan OPT
- Kualitas benih
- Penanganan pasca panen yang belum benar
- Adanya fluktuasi harga
- Ketersediaan benih bawang geol yang masih terbatas
- Kurangnya penyerapan pasar untuk bawang putih lokal karena kalah dengan bawang impor

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga dan penyerapan pasar terutama pada saat panen raya, melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.

- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani
- Adanya pelatihan/BIntek tentang penanganan pasca panen dan pengolahan pasca panen

n. Produktivitas cabai rawit

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- Faktor iklim
- Serangan OPT (terutama virus kuning dan antraknosa)
- Adanya fluktuasi harga yang sangat tinggi

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani

o. Produktivitas cabai besar

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor iklim
- 2) Serangan OPT (terutama virus kuning dan antraknosa)
- 3) Adanya fluktuasi harga yang sangat tinggi

Rekomendasi

- 1) Adanya jaminan harga melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- 2) Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani

p. Produktivitas tembakau

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sumber Daya Alam Kab. Temanggung, Kebijakan Pemda dan dukungan DBHCHT, dan budaya masyarakat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah GAP belum diterapkan, budidaya blm efisienshg Produktifitas , Iklim (Cuaca dan Angin) tidak mendukung, GHP blm diterapkan Mutu belum optimal, dan Tata Niaga yang semrawut
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah efisiensi dalam budidaya, Peningkatan Produktifitas, Peningkatan Kualitas dan Mitigasi Iklim

q. Produktivitas kopi robusta

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Topo geografis mendukung, Sumber Daya Alam Kab. Temanggung , Kebijakan Pemda Kopi Temanggung, budaya masyarakat dan Brand Kopi Temanggung semakin dikenal
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh iklim, Tanaman Sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, Kurangnya Kegiatan untuk peningkatan produksi, serangan hama penyakit

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peremajaan Tanaman Kopi, Dukungan serta Fasilitasi Kegiatan PPHT Kopi, Sosialisasi GAP Budidaya, penerapan GHP dan GMP
- r. Produktivitas kopi arabika
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDA, Upaya Konservasi Lahan Susi Prau dan Kopi Arabika untuk menambah Pendapatan Petani daerah Tembakau
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh iklim
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pengembangan Penanaman Kopi Arabika di Lereng Susi Prau, Dukungan serta Fasilitasi Kegiatan PPHT Kopi, Sosialisasi GAP Budidaya, penerapan GHP dan GMP
- s. Produktivitas ternak sapi
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi daging sapi oleh masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg
- t. Produktivitas ternak domba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi domba oleh masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun

u. Produktivitas ternak kambing

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi kambing oleh masyarakat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun

v. Produktivitas ternak ayam ras pedaging

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya produksi, ketersediaan bibit ternak yang baik
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga

w. Produktivitas ternak ayam petelur

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Manajemen pemberian pakan yang baik, ketersediaan bibit ternak yang baik
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga

x. Persentase kelahiran pedet

- 1) Faktor pendorong: Kab Temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama

ketersediaan pakannya

2) Faktor penghambat:

- a. Munculnya wabah penyakit PMK dan LSD 2 tahun terakhir mengakibatkan turunnya populasi sapi termasuk betina produktif sehingga jumlah akseptor menurun. Hal ini berkorelasi positif terhadap menurunnya kelahiran pedet 2 tahun terakhir.
- b. Selain itu akseptor yang sudah di IB tidak dilaporkan kelahirannya dikarenakan sudah dijual dalam keadaan bunting, selain itu peternak tdk mengabari petugas inseminator jika pedetnya sudah lahir.
- c. Banyak peternak sapi beralih ke beternak domba/kambing

3) Upaya pencapaian target: peningkatan dan optimalisasi reproduksi sapi betina produktif, pencegahan dan pengobatan gangrep

y. Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

Faktor Pendorong indikator tersebut adalah kebutuhan akan prasarana pertanian untuk mendorong peningkatan produksi pertanian

Faktor Penghambat Indikator tersebut

- 1) Prasarana pertanian tidak sesuai kriteria / syarat teknis
- 2) Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (misal sudah dibangun irigasi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik)
- 3) Kurangnya kesadaran pribadi dalam mengelola aset kelompok / bersama

Rekomendasi tindak lanjut indicator tersebut

- 1) Verifikasi teknis
- 2) Pendampingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan prasarana sesuai dengan fungsinya

z. Persentase penanganan penyakit hewan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah prasarana penanganan kasus berupa obat hewan, bahan/alat diagnostik dan alat kesehatan hewan

aa. Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah lokasi pengawasan produk hewan dan menambah jumlah sampel produk yang diperiksa

bb. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian

- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut
 - Ketersediaan bahan pengendali oleh dinas terkait
 - Adanya laporan serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan)
 - Kesiapsiagaan petugas dalam pengendalian OPT
- 2) Faktor Penghambat indikator tersebut
 - Kurangnya pemahaman petani terkait pengendalian OPT (organisme pengganggu tumbuhan) secara terpadu
 - Terbatasnya akses informasi petani terhadap fasilitasi pengendalian Bencana pertanian

3) Rekomendasi Tindak Lanjut Faktor Tersebut

- Meningkatkan kesadaran petani dalam pengendalian OPT secara terpadu melalui penyuluhan dan bimbingan teknis
- Memberikan sosialisasi kepada petani terkait fasilitasi pengendalian Bencana pertanian (bahan pengendali OPT , gerakan pengendalian)

cc. Persentase Kelompok Tani yang naik kelas

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok tani
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembinaan secara kontinyu kepada kelompok tani
1. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada DKPPP terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pangan, Data Pokok Bidang Perikanan dan Data Pokok Bidang Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG PANGAN

1. Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi

dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk atau ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahunun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2025 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2024 (karena data 2025 belum rilis). Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah (semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH

dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2025 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2025 Triwulan II

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
Skor Pola Pangan Harapan	77.9	78.8	79.7	80,10 (100%)	93,5 (100%)	89,43	89,43

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 cenderung meningkat sampai tahun 2023 dan menurun di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 89,43 turun sebesar 4,07 point, dibandingkan tahun 2025, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. Capaian skor pola pangan harapan Kab Temanggung dibawah capaian Provinsi Tahun 2024 sebesar 93,61 dan capaian Skor PPH nasional Tahun 2023 sebesar 94,1. Angka Skor Pola Pangan Harapan 2025 triwulan II masih menggunakan data tahun 2024.

Tabel 1.2 Skor pola pangan harapan konsumsi pangan penduduk
Berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional

Kabupaten Temanggung tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AK E*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AK E	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	261,36	1.019,05	22,89	48,53	0,5	26,3	24,6	25,0	24,26
2	Umbi-umbian	39,28	42,53	0,45	2,03	0,5	1,1	1,01	2,5	1,01
3	Pangan Hewani	86,76	226,69	17,01	10,79	2,0	23,41	21,59	24,0	21,59

4	Minyak dan Lemak	30,51	270,13	0,1 1	12, 86	0,5	6,97	6,4 3	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	4,74	25,93	0,3 2	1,2 3	0,5	0,67	0, 62	1,0	0,6 2
6	Kacang-kacangan	25,86	71,71	7,1	3,4 1	2,0	7,4	6,8 3	10, 0	6,8 3
7	Gula	33,30	123,21	0,2 3	5,8 7	0,5	3,18	2,9 3	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	238,86	116,00	3,8 7	5,5 2	5,0	29,9 4	27, 62	30, 0	27, 62
9	Lain-lain	67,60	41,83	1,8 5	1,9 9	-	-	-	-	-
	Total		1.937,0 8	53, 83	92, 24	11, 5	98,9 7	91, 3	10 0,0	89, 43

Sumber : Susenas 2024 BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

Kualitas konsumsi pangan penduduk Temanggung pada umumnya sudah mengarah pada komposisi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Apabila ditinjau dari sembilan kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan. Berdasar 9 bahan kelompok pangan sebagai faktor perhitungan skor PPH diperoleh bahwa, penurunan skor PPH tahun 2024 disebabkan oleh penurunan konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gla, sayur dan buah serta lain-lain dan peningkatan konsumsi minyak dan lemak.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja rasio skor Pola Pangan Harapan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yaitu :

a. Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA

Promosi konsumsi pangan B2SA merupakan suatu program yang dirancang sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas

mengenai pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan harapan terbentuk pola konsumsi masyarakat yang sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan diantaranya adalah : B2SA Goes to School (BGTS), Gerakan/Kampanye/Sosialisasi, Pemasangan Iklan B2SA, Promosi melalui media sosial, lomba menu B2SA dan kegiatan pelatihan pembuatan menu B2SA untuk keluarga dengan melibatkan TP PKK Kecamatan dan sekolah. Berbagai kegiatan dalam promosi konsumsi pangan B2SA telah banyak dilaksanakan. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral.

b. Pengembangan Desa B2SA

DKPPP mendukung upaya penanganan masalah gizi di Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan

pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Desa Campuranom Kec Bansari, yang bertujuan mendorong Masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA sehari – hari guna mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat, dan produktif. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam 1 (satu) wilayah desa/wilayah yang setara, dengan komponen kegiatan yaitu bantuan warung B2SA senilai Rp 10.000.000 berupa peralatan seperti MMT, Freezer, rak besi, showcase, timbangan digital dll), bantuan alat pengolahan pangan senilai Rp 6.000.000 (berupa kompor, chopper, blender dll) dengan melibatkan TP – PKK sebagai wujud kolaborasi dan sinergi kegiatan. Manfaat yang dirasakan setelah kegiatan ini dilaksanakan adalah masyarakat semakin memahami konsumsi pangan B2SA sehingga dapat menerapkan konsumsi sehari-hari di rumah tangga.

- c.** Meningkatkan ketersediaan pangan ke tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- d.** Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan.
- e.** Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).
- f.** Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tetap stabil ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung, melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein

2. Rasio ketersediaan pangan

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Rumus Rasio ketersediaan pangan adalah

$$\frac{\text{Jumlah beras yang tersedia} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk} \times \text{indeks konsumsi beras perkapita perhari} \times \text{hari}}$$

Jumlah beras yang tersedia dihitung dari GKG (gabah kering giling) x 63,84% (angka konversi nasional dalam perhitungan NBM 2022), dimana Indeks kebutuhan beras perkapita perhari sebesar 0,17778082191 kg/kap/hr atau 64,89 kg/kap/thn(data dari susenas 2024).

Perhitungan :

Jumlah beras yang tersedia Triwulan II Tahun 2025 sebesar 47.649.029,4336 kg.

Jumlah penduduk kabupaten Temanggung 822.880 jiwa (data dari website dukcapil), kebutuhan beras perorang per kapita/hari = 0,17778082191 kg/kap/hr, Jumlah hari dalam 6 bulan 181 hari (atau jumlah kebutuhan beras adalah 146.292 per orang/kap/hari), sehingga jumlah kebutuhan beras = kg/kap/thn

Rasio ketersediaan pangan = $\frac{47.649.029,4336 \text{ kg beras} \times 100\%}{146.292 \text{ per orang/kap/hari} \times 181 \text{ hari}} =$

179,951%

13.203.932,48 kg/kap/thn

Tabel 1.3 Capaian Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2025
Triwulan II

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Rasio Ketersediaan Pangan	na	na	147,06	122,54 (100%)	133,42	90,2	179,951

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rasio ketersediaan pangan Tahun 2025 triwulan II sebesar 179,951 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan intensifnya kampanye stop boros pangan, Koordinasi lintas OPD terkait dengan peningkatan produksi dengan perbaikan infrastruktur irigasi serta penambahan areal tanam (PAT), peningkatan indeks pertanaman padi serta penggunaan benih padi unggul berlabel, peningkatan kerjasama dengan daerah surplus komoditas beras dalam bentuk perdagangan/meningkatnya akses distribusi serta keterjangkauan pangan.

Dalam rangka peningkatan angka rasio ketersediaan pangan dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan (minimal mempertahankan) produksi tanaman pangan,
- b. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan pangan sesuai standart,
- c. Monitoring rutin ke tingkat produsen (penggilingan, lumbung pangan, distributor) dan pengecer
- d. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi

- penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan,
- e. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.
 - f. Peningkatan kerjasama dengan daerah surplus komoditas beras dalam bentuk perdagangan/meningkatnya akses distribusi serta keterjangkauan pangan

3. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi atas ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Rumus = $\frac{\text{Jumlah kerawanan pangan yang tertangani}}{\text{Jumlah total laporan kerawanan pangan}}$

Tabel 1.4 Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2025 Triwulan II

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	na	na	na	na	na	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2025 triwulan II Persentase Penanganan Kerawanan Pangan tercapai 100%. Sesuai dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) di Kabupaten Temanggung, yang terindikasi daerah rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3 ada 10 desa, Kegiatan penanganan kerawanan pangan melalui kegiatan stabilisasi pangan dan harga pangan meliputi 20 Kecamatan dengan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan.

Upaya penanganan kerawanan pangan juga dilakukan dengan kegiatan berupa perluasan akses informasi kerawanan pangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program bansos dr pemerintah, peningkatan aksesibilitas pangan program pengentasan kemiskinan. Faktor penghambat indikator ini adalah

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan karena dampak perubahan iklim dan serangan hama
2. Adanya iklim ekstrim memicu terjadinya pergeseran masa tanam/pola tanam yang berpegaruh terhadap ketersediaan pangan
3. Keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor
4. Fluktuasi harga pangan
5. Foodloss dan waste yang tinggi

Rekomendasi tindak lanjut:

1. Pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin
2. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial
3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat tentang menu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
4. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan pelatihan olahan pangan berbahan baku lokal
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, peternakan kecil dan perikanan untuk ketersediaan pangan keluarga dan menambah pendapatan keluarga.
6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan diversifikasi tanaman pada kelompok tani, untuk meningkatkan pendapatan kelompok tani dengan optimalisasi lahan pertanian sehingga dapat menambah produksi yang akhirnya menambah pendapatan.

4. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Akhir-akhir ini isu mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya juga menjadi bahasan utama di bidang keamanan pangan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan, sampai dengan 2025 triwulan II ada 7 sampel uji pestisida di lahan yang ditanami komoditas cabai di Kec Bulu dan Kec Bansari dengan 5 sample aman dan 2 sample diatas ambang batas.

Rumus = $\frac{\text{Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman}}{\text{jumlah sampel yang diambil}} \times 100\%$

Tabel 1.8
Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Tahun 2019-2025 Triwulan II

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	Na	na	100	100	100	98,37	71,43

Tabel 1.9
Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan Tahun 2019-2025 Triwulan II
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kab Temanggung

No	Tahun	Jumlah sample	Jenis Sample	Hasil Tes
1	2019	Na	-	-
2	2020	Na	-	-
3	2021	55	Sayuran	negatif
4	2022	42	2 beras, 40 sayuran dan buah	negatif
5	2023	85	Sayuran dan buah	1 sample mengandung formalin
6	2024	123	sayuran	121 sample aman, 1 sample positif formalin 1 sample residu pestisida diatas ambang batas
7	2025 TW II	7	cabai	2 sampel melebihi ambang batas residu pestisida, 5 sample aman-

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 7 sample telah diuji dengan hasil sample 5 sample negatif (aman) dan 2 sample melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Faktor pendorong indikator tersebut adalah media sosial sebagai media KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) keamanan pangan yang praktis dan efektif, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, kemudahan masyarakat dalam

mengakses informasi terkait dengan keamanan pangan, peningkatan kompetensi petugas oleh pusat dan provinsi, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang sehat dan aman, peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan obat-obatan dan pestisida non kimiawi

Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum optimalnya penyebaran informasi/sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar kepada stakeholder dan masyarakat, keterbatasan kegiatan peningkatan kompetensi petugas OKKPD yang menangani keamanan dan mutu pangan segar, keterbatasan sarana pengujian PSAT, penggunaan pestisida kimiawi secara tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penyebaran informasi keamanan dan mutu pangan segar melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), peningkatan kompetensi petugas OKKPD yang menangani keamanan dan mutu pangan segar, pengadaan sarana prasarana pengawasan keamanan pangan post market.

B. BIDANG PERIKANAN

1. Nilai Produksi Perikanan

Nilai Produksi Perikanan adalah Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan

Rumus = Nilai Produksi perikanan budidaya (Rp) +nilai produksi perikanan tangkap(Rp)

Tabel 1.10
Capaian Nilai Produksi Perikanan Tahun 2019-2025 TW II

N o	Uraian	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3	2024	2025 TW II
1	Nilai Produksi Perikana n	Na	na	na	na	na	248.894.213,87 9	154.924,793 1

Capaian nilai produksi perikanan Tahun 2025 triwulan II sebesar Juta Rp 154.924,7931 dengan target sebesar Ribu Rp 349.638, maka target tercapai 100%.

Ketercapaian target ini didorong oleh faktor adanya pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha budidaya ikan, ketersediaan sumber daya alam (air) yang tercukupi, penggunaan pakan alami/pakan alternatif selain pakan buatan pabrik (menurunkan tingkat ketergantungan pakan pabrikan), adanya fasilitasi/bantuan sarpras budidaya ikan dari pemerintah.

Faktor penghambat dalam pencapaian target diantaranya yaitu perubahan iklim (menyebabkan peningkatan serangan penyakit, peningkatan kematian ikan, sehingga mengurangi jumlah panen/produksi akhir), kualitas air yang menurun, harga pakan yang fluktuatif (cenderung naik, tidak sebandng dengan kenaikan harga panen), pelaku usaha budidaya belum menerapkan CBIB dan CPIB, banyaknya predator alami (lingsang, biawak, blekok dan ikan preadator), kuaitas benih yang tidak stabil/belum sesuai standart).

Upaya untuk mencapai target dilakukan antara lain penerapan pola budidaya dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara teratur (tidak melebihi kebutuhan pasar), penerapan 4 T (Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu), diversifikasi pakan untuk mengurangi ketergantungan pakan pabrikan,

pembinaan dan pendampingan cara budidaya ikan yang baik sesuai CBIB, memasang jaring pengaman predator, penyediaan benih dan induk yang bermutu dan bersertifikat, fasilitasi sarana produksi perikanan

2. Produktivitas Ikan (Ikan Nila, Ikan lele)

Untuk mengukur peningkatan usaha budidaya ikan, selain dapat dilihat dari produksinya juga dilihat dari produktivitas. Produktivitas ikan nila dihitung dari produksi ikan nila konsumsi (kg) dibagi luas kolam yang dipanen (m2). Yang dimaksud dengan ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan kolam air tenang adalah kolam dengan debit air sebesar 8 – 15 liter per detik.

Rumus penghitungan produktivitas perikanan :
$$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{luas lahan}}$$

Dengan satuan yang biasa digunakan adalah kg/m2 atau ton/Ha. Untuk produktivitas kolam air tenang lebih sering digunakan satuan kg/m2. Tingkat produktivitas dari masing-masing jenis komoditas ikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.11 Tingkat Produktivitas Ikan (Budidaya) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2025 TW II

N O	JENIS DATA	TAHUN						2025 TW II
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	IKAN NILA							
	Produksi (kg)	1.975.000	2.039.680	2.213.181	2.385.507	4.005.466	3.001.737	1.754.535
	Luas Lahan (m2)	547.000	533.900	547.000	441.725	645.956	2.490.942	1.348.985
	Produktivitas (Kg/m2)	3,61	3,82	4,05	5,40	6,20	1,21	1,3
2.	IKAN LELE							
	Produksi (kg)	4.210.740	4.711.350	4.914.562	4.912.234	5.553.005	4.607.505	2.622.617
	Luas Lahan (m2)	437.100	447.800	456.800	389.731	402.350	365.644	206.485

	Produktivi tas (Kg/m2)	9,63	10,52	10,76	12,60	13,80	12,6	12,7
--	------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tabel di atas dapat dilihat target Tahun 2025 Triwulan II tercapai dengan provitas ikan nila 1,3 kg/m2 dan provitas ikan lele 12,7 kg/m2 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024.

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan budidaya, produksi benih ikan serta produksi perikanan tangkap. Ruang lingkup dalam produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi di kolam air tenang, sawah dan karamba jaring apung.

Tabel 1.12 Produksi Ikan Konsumsi (Budidaya) di Kab Tmg Tahun 2019-2025 TW II

N O	JENIS DATA	TAHUN						2025 TW II
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produksi Ikan Konsumsi							
1	Kolam air tenang (kg)	7.452.690	7.830.880	8.177.343,52	8.179.387,86	10.160.092,51	8.064.214,29	4.590.728,27
2	Sawah (kg)	5.072.220	5.581.220	5.692.820,48	5.693.673,88	3.692.232,31	2.606.192,28	1.956.951,77
3	KJA (kg)	7.630	7.680	3.810,00	-	-	-	-
Jumlah			10.989.580	12.532.540	13.419.780	13.873.974	10.670.406,57	6.547.680,04

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Merujuk data tahun 2025 triwulan II produksi perikanan budidaya secara umum mengalami peningkatan jika dilihat dalam II triwulan sudah lebih dari 50% dari produksi tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dari kegiatan mina padi secara drastis karena awal tahun ini masuk ke musim penghujan sehingga kebutuhan air melimpah dan banyaknya petani menanam padi dengan sistem mina padi, produksi di KJA tidak ada karena rusaknya KJA di Kandangan dan Kaloran sehingga tidak dapat difungsikan untuk budidaya.

3. Persentase Nelayan Perairan Umum Terbina

Nelayan perairan umum atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) adalah orang yang bermata pencaharian dengan menangkap ikan di perairan umum (meliputi sungai, cekdam/waduk, rawa atau genangan) yang sebagian atau seluruh hasil tangkapan tersebut dijual.

Sampai tahun 2025 triwulan II ini jumlah nelayan yang terbina yaitu 60 orang.

Rumus = $\frac{\text{Jumlah nelayan terbina}}{\text{Jumlah total nelayan}} \times 100\%$

Tabel 1.13 Capaian Persentase nelayan perairan umum yang terbina 2019-2025 TW II

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	na	na	12,48	43,58	36,7	59,08	6,12

Dari target 10 % sudah tercapai 6,12% di triwulan II . Hal ini didorong oleh kegiatan pendataan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan (nelayan), pelaksanaan sosialisasi terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan, meningkatkan animo masyarakat untuk pelestarian Lingkungan (kerjasama dengan orgnisasi masyarakat dalam pengawasan dan restocking ikan diperairan umum). Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target yaitu kurangnya pengetahuan nelayan dalam penangkapan ikan ramah lingkungan, perubahan iklim berpengaruh pada ketersediaan air di perairan umum, tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi, adanya ikan predator (ikan hampala) di perairan umum, sehingga diperlukan upaya untuk pencapaian target seperti meningkatkan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait dengan penangkapan ikan ramah lingkungan serta pelarangan penebaran benih ikan non endemik/infasiv (berpotensi menjadi predator), peningkatan jejaring dengan

kelompok/komunitas/ormas dalam pengawasan penangkapan ikan dan restocking ikan di perairan umum.

Data nelayan perairan umum per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14 Data Nelayan perairan umum terbina Tahun 2025 TW II

No.	Kecamatan	Jumlah Nelayan	Tahun						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Parakan	310	na	na	16	30	10	254	
2	Kledung	1	na	na					
3	Bansari	-	na	na		20	105		
4	Bulu	36	na	na					
5	Temanggung	58	na	na	15	50	20		26
6	Tlogomulyo	1	na	na		10			
7	Tembarak	19	na	na		5			
8	Selopampan g	55	na	na	5				
9	Kranggan	110	na	na	5	35		50	34
10	Pringsurat	12	na	na	10	10			
11	Kaloran	82	na	na		25			
12	Kandangan	86	na	na		20			
13	Kedu	82	na	na	5		110	275	
14	Ngadirejo	2	na	na	5	20			
15	Jumo	41	na	na	10	15	70		
16	Gemawang	7	na	na		45	75		
17	Candiroto	45	na	na	5	100	10		
18	Bejen	31	na	na					
19	Tretep	-	na	na					
20	Wonobojo	2	na	na	4	50			
JUMLAH		980				80	400	579	60

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

4. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih Ikan

Penebaran benih ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Perikanan. Lokasi penebaran benih ikan (restocking) merupakan perairan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Secara definisi

perairan umum daratan yaitu bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tertutup massa air, terbentuk secara alami atau buatan dan terletak mulai garis pasang surut laut terendah ke arah daratan, bersifat umum (bukan milik perorangan). Di kabupaten Temanggung perairan umum berupa sungai, embung, cekdam, dan genangan air lainnya.

Jenis ikan yang ditebar meliputi ikan nilem. Ikan berasal dari hasil produksi sendiri dari Balai Benih Ikan Mungseng.

Tingginya animo masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permintaan akan penebaran benih ikan di perairan umum yang diajukan oleh Kepala Desa dan komunitas. Dari tabel dibawah dapat dilihat peningkatan baik dari segi jumlah benih maupun jumlah lokasi penebaran benih ikan. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Rumus Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan yaitu :

$$\frac{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-} \quad \text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-1}}{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-1}} \times 100\%$$

Tabel 1.15
Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan Tahun 2025 TW II

No.	Jenis data	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	na	na	20	29	28	21,4	-61,8

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Target peningkatan lokasi penebaran benih ikan adalah 10% untuk tahun 2025, Tahun 2025 triwulan II jumlah penebaran di 13 lokasi yang tersebar di Kecamatan

Wonobojo, Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Tretep dan
Kec Temanggung.

Tabel 1.16 Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di
Perairan Umum Tahun 2019 – 2025 TW II

N o.	Jenis Ikan	Tahun						
		201 9	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW I
1	Ikan Nila (ekor)	na	10.75 0	13.60 0	1.000	3.000		
2	Ikan Nilem (ekor) dan "Ikan Tawes > 3- 4 cm Ikan Nilem > 3- 4 cm"	na	23.00 0	79.32 6	110.40 0	7.650	30.200	8.100
3	Ikan Uceng (ekor)	na	900	1.000	4.700	250		
4	Udang Galah (ekor)	na			50.000	200.00 0		
Jumlah			34.65 0	93.92 6	166.10 0	210.90 0	30.200	8.100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Jumlah penebaran benih ikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari produksi sendiri di BBI Mungseng jenis ikan yang ditebar adalah ikan nilem dengan ukuran 5-7 cm yang berasal dari BBI Mungseng.

Tabel 1.17 Rekap penebaran ikan di perairan umum Tahun
2025 TW II

No.	Tanggal	Penerima Bantuan	Lokasi		Jenis ikan	Jumlah tebar (ekor)
1	22 Januari 2025	Desa Tawang Sari, Wonobojo	1 Sungai Keji		Nilem > 5-7	1.000
2	22 Januari 2025	Desa Kemiri, Kaloran	2	Kedung Sepelem	Nilem > 5-7	1.000
			3	Sungai Jangkungan		
3	22 Januari 2025	Desa Tempuran, Kaloran	4	Kedung Miri	Nilem > 5-7	1.000
			5	Kedung Cekode		
			6	Kedung Skuncen		
			7	Kedung Mblaeran		
8	23 Januari 2025	Desa Simpar, Tretep	8	Sungai Tarung	Nilem > 5-7	1.000
9	23 Januari 2025	Desa Gandon, Kaloran	9	Sungai Keji	Nilem > 5-7	1.000

10	26 Mei 2025	Desa Rejosari, Wonoboyo	10	Sungai Sendang	Nilem > 5-7	700
11	30 June 2025	Desa Pateken, Wonoboyo	11	Sungai Sekere	Nilem > 5-7	800
12	30 June 2025	PSHT Cab Temanggung	12	Sungai Pendowo	Nilem > 5-7	800
13	30 June 2025	Desa Pesantren, Wonoboyo	13	Sungai Trocoh	Nilem > 5-7	800
Jumlah				13 lokasi		8.100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

- 4) Faktor pendorong indikator tersebut adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan umum , peningkatan permintaan restocking ikan/penebaran benih di perairan umum, adanya bantuan ikan untuk penebaran benih ikan di perairan umumFaktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum
- 5) Faktor penghambat pencapaian indikator tersebut adalah keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar/restocking di perairan umum (ketersediaan benih ikan endemik tidak sebanding dengan permintaan karena tidak ada anggaran khusus untuk pembenihan ikan endemik uceng dan nilem), penerbaran/ restocking belum merata di smua perairan umum di Kab Temanggung, penurunan kualitas air sehingga ikan rentang terhadap serangan penyakit dan predator diperairan umum
- 6) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan anggaran pengadaan benih ikan untuk ditebar di perairan umum, melakukan domestifikasi induk uceng di perairan umum, pembenihan ikan endemik (uceng dan nilem) di balai benih denganteknik penyuntikan dan penggunaan hormon ovoprim guna meningkatkan produksi, peremajaan induk ikan endemik, perbaikan manajemen pakan dan kualitas air,

5. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan atau disingkat dengan AKI merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap

orang/masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar dengan satuan kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga + konsumsi ikan luar rumah tangga + konsumsi ikan tidak tercatat. AKI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang secara teknis dilaksanakan pada Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Manfaat dari perhitungan AKI adalah untuk:

- a. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
- b. Mengetahui pola konsumsi Masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
- c. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Rumus AKI = Jumlah konsumsi di Rumah Tangga + Jumlah Konsumsi diluar rumah tangga+ Konsumsi tidak tercatat

Tabel 1.18 Capaian angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap	na	na	na	na	na	22,25	22,27

Dari tabel diatas dapat di lihat capaian angka konsumsi ikan Tahun 2025 triwulan I sebesar 22,27 kg/kap/thn. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan Angka Konsumsi Ikan adalah Data Susenas BPS, Survey Bahan Pokok BPS, Data BPS terkait jumlah penduduk, tingkat

pengangguran, pangsa pengeluaran pangan dan makanan jadi, jumlah hotel, jumlah tamu hotel, dan volume impor produk perikanan.

Konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, ketersediaan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Dengan memperhatikan beragam faktor tersebut dapat memperjelas alasan tingkat konsumsi pangan termasuk konsumsi ikan di suatu daerah dapat berbeda secara signifikan. Perhitungan AKI dengan menggunakan data Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, masih diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi untuk konsumsi di luar rumah tangga (B) dan konsumsi tidak tercatat (C). Pada saat ini penetapan besarnya angka koreksi dilakukan dengan *expert adjustment* (pendapat pakar) yang berkompeten.

Faktor Pendukung Indikator AKI adalah melaksanakan kegiatan:

- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan pangan bergizi (protein hewani berupa ikan)
- d. Adanya target pengentasan stunting secara nasional sehingga menjadi fokus daerah
- e. Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) pada masyarakat
- f. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pengolahan kepada Poklahsar untuk meningkatkan produksi

Faktor Penghambat Indikator AKI adalah:

- c. Tingkat ekonomi dan budaya masyarakat yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan guna memenuhi kebutuhan protein hewani harian
- d. Tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan

peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

- e. Tidak adanya anggaran khusus untuk pendataan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Upaya pencapaian indikator AKI:

- c. Sosialisasi Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan penyerahan paket olahan ikan. Pada Tahun 2024, melalui program DKP Provinsi dan Program Gemarikan Ditjen PDSPKP – KKP, telah dilaksanakan kegiatan Gemarikan di Desa Keblukan, Kec. Kaloran dan Desa Gemawang, Kec. Gemawang
- d. Diversifikasi ikan menjadi produk olahan pangan yang dilakukan oleh Poklahsar
- e. Menjalin kerjasama dengan warung/ toko dan sekolah berasrama /pondok pesantren untuk pemasaran produk, bahan baku diambil langsung dari pembudidaya

C. BIDANG PERTANIAN

INDIKATOR SASARAN

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha selama satu periode tertentu (tahunan/triwulan). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB disajikan dalam dua pendekatan yaitu PDB atas harga berlaku dan PDB atas harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ini dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi atau menggambarkan tingkat (level) nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh faktor produksi dalam

perekonomian. PDB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2010). PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau tingkat pertumbuhan riil (nyata) perekonomian baik secara total maupun menurut lapangan usaha. Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 6.174,02 miliar rupiah atau sebesar 22,94 persen. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 93,74 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan yang mencapai 25,92 persen (angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 27,21 persen). Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,94 persen (turun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 23,36 persen), disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,95 persen (naik jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 20,62 persen). Berikutnya kategori Konstruksi sebesar 5,63 persen (naik jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,12 persen). Capaian indikator Kontribusi Sektor Pertenain terhadap PDRB

Tahun 2025 masih menggunakan data 2024 karena data tahun 2025 belum rilis.

Tabel 1.18 Capaian Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB
Tahun 2025 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB	%	na	na	na	na	na	22,94	22,47

Faktor pendorong indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yaitu Penerapan GAP dan GHP untuk meningkatkan produksi, mekanisasi pertanian, KUR sektor pertanian, meningkatnya konsumsi sektor pertanian (pertambahan jumlah penduduk), investasi disektor pertanian. Adapun faktor penghambat belum optimalnya produksi pertanian, berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian, rendahnya nilai tukar petani, akses permodalan sektor pertanian, pertambahan jumlah penduduk. Adapun upaya pencapaian target melalui peningkatan produksi melalui penerapan GAP, GHP dan mekanisasi pertanian, mempermudah akses permodalan melalui KUR, mempermudah perijinan untuk menarik investor,

2. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi dan Jagung.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (kwintal) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi dan

jagung.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman pangan di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1.19 Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan 2019-2025 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	Produktivitas Padi								
	Luas Panen	ha	30.567,1	26.458,5	20.553,80	16.784,3	18.038,8	14.802	7.353,01
	Produksi	ton	196.847	156.105,7	121.262,700	105.992,7	114.471,7	91.022,2	8.331,85
	Produktivitas	ton/ha	6,4	5,9	5,9	6,315	6,346	6,149	6,342
2.	Produktivitas Jagung								
	Luas Panen	ha	14369,1	11.221,5	8.580,3	5.714,7	8.395,50	6.264	963
	Produksi	ton	72.916	54.985,35	38.611,35	26.344,6	38.619,5	36.057,4	3.692,14
	Produktivitas	ton/ha	5,08	4,9	4,500	4,61	4,6	5,76	5,51

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 triwulan II untuk produktivitas padi sebesar 6,342 ton/ha dan jagung sebesar 5,51 ton/ha, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 triwulan II mengalami peningkatan untuk komoditas padi dan penurunan untuk komoditas jagung. Penurunan dan peningkatan produktivitas tidak jauh dari pengaruh perubahan iklim, peningkatan serangan hama penyakit, belum meratanya sarpras budidaya, petani belum menggunakan benih unggul bersertifikat, banyaknya jaringan irigasi yang rusak/perlu rehabilitasi, keterbatasan tenaga kerjadi bidang pertanian, harga jual komoditas lain yang menarik minat petani tanaman pangan untuk beralih komoditas.

Faktor pendorong pencapaian indikator didukung oleh Sinkronisasi program/kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten yang berorientasi pada swasembada pa ngan (melalui peningkatan kuota pupuk

subsidi, penerapan GAP dan GHP, penggunaan benih unggul, pengurangan food loss, peningkatan saprodi), peningkatan HPP padi dan jagung diharapkan dapat menstimulasi petani tanaman pangan, kenaikan harga beras di tingkat konsumen menyebabkan petani menanam padi minimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendiri, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi serta program pompanisasi.

Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2024 melalui berbagai bentuk kegiatan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pertanian, penerapan GAP dan GHP untuk meningkatkan produksi dan mengurangi food loss, pengendalian serangan hama penyakit, mensosialisasikan lebih lanjut pentingnya swasembada pangan, memberikan pengetahuan analisa usaha tani, serta upaya efisiensi usaha dengan optimalisasi semua faktor produksi guna meningkatkan keuntungan yang didapatkan petani

3. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Istilah hortikultura sendiri asalnya dari bahasa latin yaitu dari kata *Hortus* artinya kebun, dan kata *Culture* artinya bercocok tanam. Jadi secara umum hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1.20 Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025 TW II

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Bawang Putih							
	Luas panen (ha)	3.044	2.481	1.591	1.169,5	1469,5	1.319	963
	Jumlah produksi(ton)	24.086,8	16.335,00	10.355,3	8.088,4	10493,3	9.631,2	6.884,5
	Produktivitas (ton/ha)	7,91	6,58	6.51	6,916	7,141	7,302	7,149
2	Bawang Merah							
	Luas panen (ha)	1.590	1.246	1.555	2.304	2335,5	2.779,5	2.228
	Jumlah produksi (ton)	12.798	9.171,10	11.102,1	18.662,4	17901,8	21.263,18	15.863,4
	Produktivitas (ton/ha)	8	7,36	7.140	8,1	7,665	7,65	7,12
3	Cabai Rawit							
	Luas panen (ha)	2.506	2622	2.977,50	5.045,5	6900	7.583,5	2.785
	Jumlah Produksi (ton)	16.706	18.345,7	20.802.930	38.525,415	52095,0	56.876,2	42.028,25
	Produktivitas (ton/ha)	6,66	7,00	6,987	7,636	7,55	7,5	7,25
4	Cabai Besar							
	Luas panen (ha)	3.175	2859	2.818,00	3.203,5	4175	3.760,5	2.785
	Jumlah Produksi (ton)	23.022	20.613,8	19.886.640	25.320,724	32368,775	28.579,8	20.469,75
	Produktivitas (ton/ha)	7,25	7,21	7.057	7,904	7,753	7,6	7,35

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di 2025 triwulan II produktivitas bawang putih 7,149 ton/ha, bawang merah 7,12 ton/ha, cabai rawit 7,25 ton/ha dan cabai besar 7,35 ton/ha. Secara provitas capaian bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan cabai besar tahun 2025 target tercapai.

Kenaikan dan penurunan produksi komoditas hortikultura ini erat kaitannya dengan peralihan komoditas yang dibudidayakan oleh petani (tanaman pangan beralih ke hortikultura, tembakau beralih ke tanaman hortikultura) yang di sebabkan meningkatnya animo/trend petani untuk budidaya tanaman hortikultura karena harga jual yang tinggi (cendrung stabil untuk bawang merah) dalam jangka waktu yang lama serta tata niaga tanaman hortikultura yang jelas dibanding dengan komoditas yang lain.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Kabupaten Temanggung sebagai daerah penyangga nasional

komoditas hortikultura, adanya kemitraan penanaman bawang putih dengan pihak swasta, adanya penangkar yang menampung hasil panen petani bawang putih, masih tersedianya pasar untuk bawang putih local, fasilitasi bantuan sarpras untuk budidaya, peningkatan kuota pupuk subsidi, harga bawang merah cenderung stabil, umur panen bawang merah yang relatif lebih cepat dibanding bawang putih, bawang merah bisa dijadikan alternatif tumpang sari dengan komoditas hortikultura lainnya dan tanaman perkebunan semusim, harga cabai yang cenderung tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang merah dan champion cabai melalui APBN.

Faktor penghambat peningkatan produktivitas tanaman hortikultura seperti perubahan iklim menyebabkan peningkatan serangan hama dan penyakit serta perubahan masa tanam, masuknya bawang putih impor sehingga konsumen lebih memilih bawang putih impor dengan umbi yang berukuran besar daripada bawang putih local, harga saprodi yang terus naik, penerapan GAP dan GHP yang belum sesuai, bawang merah belum punya kemandirian produk benih, harga benih bawang merah pada saat musim tanam cenderung mahal, tenaga kerja pertanian yang mahal.

Untuk mengatasi hal tersebut dan mempertahankan produksi dilakukan beberapa langkah yaitu kerjasama dengan BRIN untuk kajian komoditas bawang putih, bawang merah dan cabai, melaksanakan pengembangan bawang putih lokal varietas Geol Temanggung Agrihorti, dimana varietas tersebut memiliki ukuran umbi yang lebih besar dibanding varietas bawang putih lokal lainnya, peningkatan jejaring pemasaran, pendampingan dan fasilitasi bantuan sarana prasarana pra panen dan pasca panen, penanganan hama dan penyakit secara lebih dini dan pelatihan GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP yang benar, pelatihan pembuatan pupuk organik guna

antisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura

4. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu : tembakau, kopi robusta, kopi arabika.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Berikut data produktivitas tanaman perkebunan selama tahun 2019 - 2025 terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.21 Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025 TW II

Uraian		Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Tembakau							
	Luas panen (ha)	18.868,98	11.598,0	18.293,08	15.801	14.764	14.088	14.088
	Jumlah produksi (ton)	12.820	17.102	12.585,639	10.562,6	9.685,73	9.438,96	9.438,96
	Produktivitas (ton/ha)	0,68	0.678	0,688	0,668	0,656	0.67	0.67
2	Kopi Robusta							
	Luas panen (ha)	11.105,82	11.507	11.724,46	12.977,37	12.972,2	11.193,972	11.193,972
	Jumlah produksi (ton)	7.574,15	7.813,1	83.841,6	8.994,321	8.476,9	8.329,436	8.329,436
	Produktivitas (ton/ha)	0,68	0.679	0,715	0,693	0,653	0,744	0,744

Uraian		Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
3	Kopi Arabika							
	Luas panen (ha)	1.095,13	1369	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.177,33	1.177,33
	Jumlah Produksi (ton)	675,6	848,8	955,24	1.002,97	992,434	649,288	649,288
	Produktivitas (ton/ha)	0,617	0,62	0,611	0,65	0,575	0,551	0,551

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja komoditas perkebunan masih menggunakan data Tahun 2024 karena hasil dari statistik perkebunan belum rilis. Adapun faktor pendorong indikator komoditas perkebunan diantaranya kondisi geografis dan iklim mendukung untuk pertumbuhan kopi robusta, kopi arabika dan tembakau, harga kopi yang baik membuat petani bergairah untuk menanam serta melakukan peremajaan tanaman kopi, kemampuan berbudidaya sudah cukup dikuasai oleh petani, peningkatan jejaring pemasaran dengan pihak luar, fasilitasi bantuan saprodi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi kopi guna peningkatan produksi, menanam tembakau sudah menjadi budaya masyarakat temanggung, adanya kemitraan dengan perwakilan Perusahaan tembakau dalam hal budidaya dan pemasaran, GAP sudah dikuasai dengan baik oleh petani, ketersediaan varietas unggul Lokasi (Kemloko 1-8) yang dibagikan gratis kepada Masyarakat, animo masyarakat untuk konservasi lahan kritis di lereng gunung sumbing, tembakau dan prau dengan komoditas kopi arabica.

Faktor penghambat terkait dengan penurunan luas panen dan produksi komoditas tembakau disebabkan karena perubahan cuaca/iklim berpengaruh pada jadwal tanam, tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen, pada masa pertumbuhan), tata niaga yang tidak jelas sehingga kepastian harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) mengakibatkan petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan (hortikultura), harga saprodi yang mahal

serta tenaga kerja pertanian yang mahal dan semakin terbatas mengakibatkan biaya usaha tani menjadi naik/mahal.

Faktor penghambat pada komoditas kopi robusta diantaranya banyaknya kopi yang sudah tua perlu diremajakan, perubahan iklim berpengaruh terhadap proses vegetatif dan generatif (pembungaan) menjadi terganggu sehingga produktivitas kopi turun hampir 40 % - 50 %, peningkatan serangan hama penyakit utamanya penggerek buah kopi (PBKo), belum adanya standart harga kopi (kopi organik dengan dengan kopi asalan tidak terpaut jauh) sehingga petani kurang berminat untuk budidaya kopi organik, dan untuk kopi arabica densitas tanaman kurang (kerapatan tanaman kurang) sehingga provitas untuk setiap luasan belum optimal, pola tanam kopi arabica sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produksi meningkatkan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) terkait dengan informasi cuaca dari BMKG untuk menentukan masa tanam, pemberian bantuan pupuk NPK, ZA, pupuk organik dan bibit unggul untuk tanaman tembakau dan kopi, peningkatan GAP dan GHP, peningkatan jejaring pemasaran, peningkatan gerakan pengendalian hama dan penyakit, bantuan bibit kopi dan entres untuk peremajaan, pembibitan tembakau untuk menambah densitas/kerapatan, fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen,

B. BIDANG PERTANIAN (SUB BIDANG PETERNAKAN)

1. Produktivitas Ternak Ruminansia

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto,

1994.

Ternak ruminansia adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang yang merupakan Subordo **Ruminantia**. Nama ruminansia berasal dari bahasa Latin “ruminare” yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak.

Ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau dan kelompok ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba (Blakely dan Bade, 1998)

Yang dimaksud ternak ruminansia pada indikator ini hanya tiga jenis ternak meliputi: sapi, kambing, dan domba. Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain itu terdapat hasil sampinganya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat/bobot hidupnya”. Secara umum, semakin banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksinya.

Rumus produktifitas ternak ruminansia diperoleh dari Jumlah Produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong ditambah konstanta (C = rata rata selisih karkas yang dipotong di rumah pemotongan hewan dengan pemotongan pada saat hari raya idul adha).

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama tahun 2019-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.22
Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025
TW II

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Sapi							
	- Jumlah Produksi	671.09	637.46	775.37	737.178	876.26	804.609	549.757

	daging (Kg)	9	8	2		5		
	- jumlah ternak yang dipotong (ekor)	3.971	3.772	4.588	4.362	5.185	4.761	3.253
	- Konstanta	7,8	8	8,2	8,4	8,60	8,60	8,6
	- Produktivitas (Kg/ekor)	176,80	177	177,20	177,4	177,6	177,6	177,6
2	Kambing							
	- Jumlah Produksi daging	8.681	8.100	7.898	11.259	9.963	117.72	10.138,50
	- jumlah ternak yang dipotong	643	600	585	834	738	872	751
	- Konstanta	0,16	0,8	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21
	- Produktivitas	13,67	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71	13,71
3	Domba							
	- Jumlah Produksi daging	179.483	231.323	227.273	249.007,5	241.785	255.285	322.853
	- jumlah ternak yang dipotong	13.295	17.135	16.835	18.445	17.910	18.910	23.915
	- Konstanta	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21
	- Produktivitas	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,71	13,71

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TW II

Dari tabel diatas dapat didapatkan bahwa provitas sapi sebesar 177,6kg/ekor, kambing 13,72 kg/ekor dan domba 13,71 kg/ekor tahun 2025 memenuhi target. Faktor pendorong indikator kinerja tersebut diantaranya meningkatnya konsumsi daging sapi, kambing dan domba oleh masyarakat, harga daging sapi, kambing, domba cenderung stabil, kepercayaan peternak penanganan penyakit diberikan oleh petugas, ketersediaan petugas dan obat-obatan dilapangan.

Adapun faktor penghambatnya banyaknya sapi terserang PMK dan LSD, tingginya sapi yang terserang penyakit cacing,dan avitaminosis, Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg, banyaknya pemotongan sapi betina produktif, mutu pakan ternak yang buruk sehingga pertumbuhan tidak maksimal, beternak masih menjadi pekerjaan sampingan, kurangnya pengetahuan petani tentang cara beternak yang baik, tingkat keberhasilan IB yang rendah, tingginya pemotongan domba dan kambing usia dibawah 1 tahun, banyaknya hewan yang terserang penyakit karena higiene sanitasi kandang yang buruk.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target peningkatan ketersediaan obat dan vitamin ternak, vaksinasi dan pengobatan bagi hewan yang terserang penyakit, menyarankan dan

memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas bobot 200 kg, pelarangan pemotongan sapi betina produktif, menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan domba dan kambing diatas umur 1 tahun, sosialisasi peningkatan mutu pakan dan higiene sanitasi kandang

2. Produktivitas Ternak Unggas

Definisi produktivitas ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994. Jenis ternak meliputi: Ternak Ayam Ras Pedaging, Ternak Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras.

Produktivitas ternak ayam ras pedaging dan ayam buras diukur dari jumlah produksi dagingnya sedangkan produktivitas ayam ras petelur diukur dari jumlah produksi telurnya. Secara umum semakin besar bobot badan/bobot hidup ternak unggas yang dipotong semakin besar juga angka produktivitasnya. Sedangkan untuk ayam ras petelur, produktivitas selain dipengaruhi gen juga dipengaruhi lingkungan (faktor pakan, lingkungan dan pemeliharaan).

Rumus penghitungan produktivitas ayam ras pedaging dan ayam buras diperoleh dari jumlah produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong. Sedangkan rumus penghitungan produktivitas ayam ras petelur diperoleh dari jumlah produksi telur dibagi jumlah populasi ternak.

Perkembangan produktivitas ternak unggas selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.23 Produktivitas Ternak Unggas Tahun 2019-2025 TW

II

No.	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ayam Ras Pedaging							
	- Jumlah Produksi daging (Kg)	10.211.850	6.914.355	7.047.798	6.128,440,13	6.147.188	6.218.437,50	3.12
	- jumlah ternak yang dipotong (ekor)	13.615.000	9.219.140	9.397.064	8.171.253,5	8.196.251	8.291.250	4.17

	- Produktivitas (Kg/ekor)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
2	Ayam Ras Petelur							
	- Jumlah Produksi telur	8.434.221	7.886.499	7.259.257,8	7.350.731	7.839.791,51	8.215.172	4.16
	- jumlah populasi ternak	782.061	705.714	707.530	710.530	720.530	755.030	76
	- Produktivitas (kg/ekor)	10,88	10,88	10,26	10,35	10,88	8,16	

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TW II

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 triwulan II provitas ayam ras pedaging sebesar 0,75 kg/ekor, ayam petelur 5,44 kg/ekor. Adapun faktor pendorong indikator tersebut adalah ketersediaan bibit yang baik, higiene sanitasi kandang yang baik, tersedianya obat dan vaksin yang cukup, mutu pakan yang baik. Faktor penghambat untuk pencapaian target yaitu harga saprodi ternak yang mahal. Adapun Upaya untuk pencapaian target dilakukan melalui vaksinasi dan pengobatan bagi hewan yang sakit, memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga.

3. Persentase kelahiran Pedet

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 'insemination gun'.Persentase kelahiran Pedet merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan inseminasi buatan.

Tujuan Inseminasi Buatan

- Memperbaiki mutu genetika ternak;
- Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya;
- Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;
- Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;

- Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.

Keuntungan Inseminasi Buatan (IB)

- Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
- Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
- Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
- Dengan peralatan dan teknologi yang baik sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama;
- Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
- Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
- Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Kerugian Inseminasi Buatan (IB)

- Apabila identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan;
- Akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil;
- Bisa terjadi kawin sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama;
- Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test).

Rumus Persentase kelahiran pedet dihitung dari jumlah kelahiran pedet dibagi dikalikan jumlah akseptor IB 100%

$$\frac{\text{Jumlah kelahiran pedet}}{\text{Jumlah akseptor IB}} \times 100\%$$

Jumlah akseptor IB_x 100%

Tabel 1.23 Produktivitas Ternak Unggas Tahun 2019-2025 TW

II

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase kelahiran pedet	na	na	na	na	na	48,3	37,74

Tabel diatas diperoleh dari perhitungan jumlah akseptor IB sebanyak 1.330 ekor dibagi pedet yang lahir sejumlah 502 ekor. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya Kab temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama ketersediaan pakannya, obat-obatan dan alat medis yang memadai, animo masyarakat untuk IB tinggi. Faktor penghambat yaitu munculnya wabah penyakit PMK dan LSD 2 tahun terakhir mengakibatkan gangguan reproduksi (inseminasi harus dilakukan berulang dan yang mengalami gangguan reporduksi harus diobati terlebih dahulu), turunnya populasi sapi termasuk betina produktif (dampak PMK) sehingga jumlah akseptor menurun (Hal ini berkorelasi positif terhadap menurunnya kelahiran pedet 2 tahun terakhir), jumlah petugas belum seimbang dengan jumlah populasi ternak, deteksi birahi yang kurang akurat, kondisi repisien(sapi betina) yang akan di IB, kualitas semen beku, belum meratanya ketrampilan petugas IB, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan hasil IB (sudah dijual dalam keadaan bunting peternak tdk mengabari petugas inseminator jika pedetnya sudah lahir). Upaya pencapaian target dengan melaksanakan surveilens, vaksinasi dan pengobatan penyakit PMK, LSD, sosialisasi higiens sanitasi kandang, sosialisasi penanganan penyakit, peningkatan kompetensi petugas IB dan keswan, KIE (komunikasim informasi dan edukasi) terkait dengan deteksi birahi betina,

peningkatan kualitas semen beku.

4. Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan penyakit oleh pusat kesehatan hewan (puskesmas) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: avitaminosis, abses, cacingan, Helmintiasis, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Bloat, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), diare, Rhinitis, Scabies, Jamur, Pneumonia, Keracunan dll. Sampai dengan TW II 2025 total terdapat 1.084 laporan kasus dan yang tertangani 1.075 kasus. Sehingga presentasi yang telah tertangani sebanyak 99,17%.

Tabel 1. 24
Capaian Persentase Penanganan penyakit Hewan Tahun
2025 TW II

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase Penanganan penyakit Hewan	na	na	96,68	100	97,26	97,43	99,17

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 triwulan II sebesar 99,17%, artinya target akhir 2025 sebesar 87 % tercapai. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, ketersediaan obat -obatan dan peralatan medis, peningkatan kepercayaan masyarakat untuk memeriksakan/melaporkan ke petugas medis.

Faktor penghambat obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim, proporsi petugas dan populasi ternak tidak imbang, higines sanitasi kandang yang buruk, peternak melaporkan saat kondisi sudah parah, kurangnya pengetahuan mitigasi penyakit, munculnya penyakit baru.

Upaya pencapaian target melalui penyediaan obat, vitamin dan alat medis yang memadai, peningkatan kompetensi petugas keswan, KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) lewat medsoa dan media yang lain tentang penyakit menular dan higienes sanitasi kandang, peningkatan kegiatan surveilens, pengamanan lalu lintas ternak dari luar kabupaten.

Tabel 1.25
Rekapitulasi Data Penyakit Hewan Tahun 2025 Triwulan II

NO.	JENIS PENYAKIT	JENIS HEWAN					JUMLAH TOTAL
		KUCING	ANJING	DOMBA/ KAMBING	SAPI	LAINNYA	
1	abses	9	0	0	0	1	10
2	arthritis	8	0	0	0	0	8
3	avitaminosis	42	1	0	0	1	44
4	cacingan	2	0	0	0	0	2
5	CRD	0	0	0	0	3	3
6	dermatophytosis	10	0	0	0	0	10

7	enteritis	40	0	0	0	0	40
8	FIP indikasi	4	0	0	0	0	4
9	FLUTD	9	0	0	0	0	9
10	gastritis	16	0	0	0	0	16
11	keracunan	3	0	0	0	0	3
12	konjungtivitis	12	0	0	0	1	13
13	kontrol kesehatan	10	2	10	0	1	23
14	lipoma	0	0	0	0	1	1
15	luka bernanah abses	0	0	0	0	1	1
16	otitis externa	6	0	0	0	0	6
17	rhinitis	82	0	0	0	0	82
18	scabies	108	2	0	0	0	110
19	vulnus	10	0	0	0	1	11
20	anorexia	2	0	0	0	0	2
21	helminthiasis	1	0	0	0	0	1
22	pneumonia	2	0	0	0	0	2
23	tympani	0	0	1	0	0	1
24	infestasi kutu	4	0	0	0	0	4
25	febris	13	0	0	0	0	13
26	USG	2	0	0	0	0	2
27	syaraf	1	0	0	0	0	1
28	sariawan	2	0	0	0	0	2
29	PMK	0	0	0	225	0	225
30	LSD	0	0	0	14	0	14
31	Bovine Ephemeral Fever	0	0	0	81	0	81
32	Babesiosis	0	0	0	1	0	1
33	Avian Influenza	0	0	0	0	330	330
JUMLAH		398	5	11	321	340	1075
JUMLAH TOTAL		1084					
JUMLAH TERTANGANI		1075					
PRESENTASE TERTANGANI		99,17					

4. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat.

Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat merupakan salah satu indikator pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung

antara kesehatn hewan dan produk hewan, kesehtan manusia serta kesehtan lingkungan.

Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*.

Rumus persentase pengawasan produk hewan (bahan asal hewan) adalah jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang memenuhi syarat dibagi total jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang diawasi dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang diawasi}} \times 100 \%$$

Tabel 1.26

Capaian Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Tahun 2025 TW II

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	60	84,298	82,96	100	82,1	82,41	79,45

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengawasan produk hewan tahun 2025 triwulan II sebesar sebesar 79,45% (target 77%). Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to tabel*).

Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*food borne disease*) atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan resiko produk hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta resiko produk hewan yang tidak halal bagi yang dipersyaratkan.

Pengambilan sampel dilakukan secara uji petik mengingat keterbatasan dana yang ada. Ke depan perlu perencanaan dan pendanaan yang memadai jika ingin mewujudkan peta penyakit hewan yang ideal dengan sampling di 20 kecamatan secara merata untuk mengetahui keASUHAN (Aman, sehat, Utuh dan Halal) dari bahan pangan asal hewan. Hasil pemeriksaan sampel organ hati sapi terhadap keberadaan cacing hati di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.27 Sampel Organ Hati

No.	Lokasi	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil Pemeriksaan	
				Cacing Hati	Penyakit Lainnya
1	RPH Temanggung	Hati	803	136	29

Sumber: Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Hasil pemeriksaan postmortem/ setelah dipotong yang dilakukan di RPH Parakan dan Temanggung pada Triwulan II tahun 2025 terhadap sampel organ hatinya adalah dari total pemotongan

sebanyak 803 ekor, hasil pemeriksaan hatinya ditemukan sebanyak 136 buah ditemukan cacing hati. Persentase kasus cacing hati dari sapi yang dipotong di RPH adalah 16,94%. Sedangkan presentase kasus penyakit lainnya sebanyak 3,61 %. Presentase produk hewan yang memenuhi syarat sebanyak 79,45 %. Hati yang mengandung cacing hati diafkir dan tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan kesehatan.

5. Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

Prasarana pertanian adalah infrastruktur pendukung yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan pertanian. Salah satunya dengan fasilitasi pengembangan sumber-sumber air dengan pembangunan jaringan irigasi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah prasarana yang dimanfaatkan} \times 100\%}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}}$$

Tabel 1. 28 Capaian Kinerja Tahun 2025 Triwulan II

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	na	na	na	na	Na	100	100

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya terealisasi sebesar 100% (masih menggunakan data TW IV Tahun 2024, karena masih melalui dalam tahap proses pengadaan barang/jasa). Prasarana pertanian disini adalah kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian (sumber-sumber air) yang selama ini dibangun dimanfaatkan

oleh masyarakat secara maksimal dan berfungsi dengan baik. Di tahun 2024 sebanyak 70 unit telah dibangun dan dimanfaatkan oleh Masyarakat berupa sumur tanah dangkal/dalam, RJIT, Irigasi perpompaan, Irigasi Perpipaan dan irigasi sprinkle dari semua sumber anggaran. Tahun anggaran 2025 ini terdampak efisiensi anggaran pusat sehingga dana DAK untuk sarana dan prasaranya 0. Akan tetapi masih terdapat 15 unit pembangunan sarana dan prasarana yang didanai baik dari dana DBHCHT dan APBN seperti rincian sebagai berikut:

No.	NAMA KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	KET
	Irigasi Air Tanah dalam		
1	KT Banjarsari Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
2	KT Kertosari Jumo	DBHCHT APBD II	
3	KT Losari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
4	KT Kataan Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
	EMBUNG PERTANIAN		
1	KT Wonosari Bulu	DBHCHT APBD II	
2	KT Tuksari Kledung	DBHCHT APBD II	
3	KT Tlahab Kledung	DBHCHT APBD II	
4	KT Pagersari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
	RJIT		
1	KT Tegalurung Bulu	DBHCHT APBD I	
2	KT Sukomarto Jumo	DBHCHT APBD I	
3	KT Botoputih Tembarak	DBHCHT APBD I	
4	KT Medari Ngadirejo	DBHCHT APBD I	
	Irigasi Perpompaan APBN		
1	KT Lambang Bibit Gondang Wayang Kedu	APBN	
2	KT Sri Sadono Mergowati Kedu	APBN	
3	KT Rukun Sentoso Pendowo Kranggan	APBN	

Faktor Pendorong indikator tersebut adalah program pemerintah untuk swasembada pangan membutuhkan

pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian,

Faktor Penghambat Indikator tersebut

- 4) Jaringan sekunder yang rusak (kewenangan DPUPR)
- 5) Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan/mengelola asset jaringan secara swadaya)
- 6) Perubahan iklim (hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air tidak sesuai dengan kemampuan kapasitas sarana irigasi untuk menampung air),
- 7) Sampah yang dibuang di badan air,
- 8) Prasarana pertanian yang dibangun tidak sesuai dengan kriteria dan kondisi lapangan
- 9) Kurangnya ketersediaan air permukaan khususnya untuk irigasi perpompaan

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut

1. Koordinasi dengan instansi sesuai dengan kewenangannya (yang menangani jaringan sekunder dan persampahan),
2. Pendampingan kelompok dalam pemeliharaan dan pengelolaan asset
3. Pembangunan prasarana pertanian sesuai kriteria teknis dan kondisi di lapangan
4. Verifikasi administrasi dan lapangan
5. Larangan membuang sampah di saluran irigasi

6. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian dihitung dari jumlah luasan tertangani dibagi jumlah luasan terpapar yang terjadi / dilaporkan di Kabupaten Temanggung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah luasan tertangani (ha)}}{\text{Jumlah luasan yang terpapar (ha)}} \times 100\%$$

Tabel 1. 29 Capaian Kinerja Tahun 2025

No		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	na	na	41,2 (100%)	41,45 (100%)	40,62 (100%)	99,23 (100%)	97,38

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tahun 2025 triwulan II capaian kinerja indikator tersebut sebesar 97,38%, dengan luas cakupan pengendalian 494,85 ha dari total luas hamparan lokasi yang terpapar seluas 508,15 hektar (berdasarkan laporan yang masuk). Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi. Upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir serangan hama/penyakit yaitu pelatihan PPHT (penerapan pengendalian hama terpadu), pelatihan pembuatan pestisida nabati, penyediaan obat-obatan. Faktor yang mempengaruhi gerakan pengendalian jumlah obat-obatan yang terbatas dan luas daerah yang terpapar sangat luas, jenis serangan hama penyakit yang semakin beragam.

Faktor Pendorong indikator tersebut

- Ketersediaan bahan pengendali oleh dinas terkait

- Adanya laporan serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan)
- Kesiapsiagaan petugas dalam pengendalian OPT

Rekomendasi Tindak Lanjut Faktor Tersebut

- Meningkatkan kesadaran petani dalam pengendalian OPT secara terpadu melalui penyuluhan dan bimbingan teknis
- Memberikan sosialisasi kepada petani terkait fasilitasi pengendalian Bencana pertanian (bahan pengendali OPT , gerakan pengendalian)

7 Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas/awal, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien. Data capaian kinerja Tahun 2025 Triwulan II masih menggunakan data capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 45 kelompok tani yang naik kelas karena penilaian kenaikan kelas kelompok dilaksanakan bulan Nopember.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

Persentase kelompok
tani yang naik kelas

=

jumlah kelompok tani yang naik kelas

jumlah total kelompok tani

X 100 %

Tabel 1.30

Persentase kelompok tani yang naik kelas

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,678	0,81	1,03	0,98	1,4	1,4

Tabel 1.31

Jumlah Kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1.	jumlah kelompok tani yang naik kelas	15	22	28	40	45	45

Tahun 2025 Triwulan II sebanyak 45 kelompok (1,4%) dari total kelompok tani yang terdaftar 3205 (2737 kelompok tani, 468 KWT). Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah :

- a. Ketersediaan sumber daya (Modal, Teknologi dan SDM),
- b. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari anggota poktan, akses pasar dan pemasaran,
- c. akses kredit dan pembiayaan,
- d. jaringan dan kerjasama dengan lembaga lain, pengakuan dan penghargaan dari pemerintah

Faktor yang menghambat

- a. Kurangnya kemampuan manajerial,
- b. Belum meratanya sumber daya (modal, teknologi dan SDM),
- c. Belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan kelompok,
- d. Ketergantungan pada subsidi pemerintah,

- e. Belum meratanya akses pasar dan pemasaran,
 - f. Belum meratanya akses pendidikan dan pelatihan bagi petani,
 - g. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kenaikan kelas kelompok, keterbatasan modal
- Upaya tindaklanjut dalam pencapaian target
- a. Pelatihan dan pendampingan teknis dan manajerial,
 - b. Penguatan jaringan dan pengembangan strategi pemasaran,
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait,
 - d. Membuat rencana aksi dan penentuan indikator keberhasilan kelompok,
 - e. Peningkatan akses teknologi pertanian modern,
 - f. Peningkatan kesadaran dan partisipasi kelompok, membuat sistem penghargaan untuk kelompok berprestasi

Tabel 1.31 DATA KENAIKAN KELAS KELOMPOK TANI KABUPATEN TEMANGGUNG 2025

NO	Nama Kelompok	Alamat	Dari	Kenaikan Kelas
1	KT Depok	Ds.Karangtejo, Kec.Jumo	Awal	Pemula
2	KT Kulon Progo	Ds. Padureso, Kec.Jumo	Awal	Pemula
3	KT Sumber Rejeki	Kel.Walitelon Selatan Kec.Temanggung	Pemula	Lanjut
4	KT Karya Usaha	Kel.Mungseng Kec.Temanggung	Pemula	Lanjut
5	KT Subur	Ds.Mergowati Kec.Kedu	Awal	Pemula
6	KT Pangungkap Widodo	Ds.Karangtejo, Kec.Kedu	Awal	Pemula
7	KT Maju Sejahtera	Ds.Duren Kec.Bejen	Awal	Pemula
8	KWT Wanita Utama	Ds.Kebondalem Kec.Bejen	Pemula	Lanjut
9	KT Sumber Rejeki I	Ds. Caturanom Kec.Parakan	Pemula	Lanjut
10	KT Rukun Tani	Ds.Depokharjo Kec.Parakan	Awal	Pemula
11	KWT Margi Utami	Ds.Kembangsari Kec.Kandangan	Pemula	Lanjut
12	KWT Sido Makmur	Ds.Caruban Kec.Kandangan	Pemula	Lanjut
13	KT Subur	Ds.Kacepit Kec.Selopampang	Pemula	Lanjut

14	KT Manunggal Roso	Ds.Jetis Kec.Selopampang	Pemula	Lanjut
15	KT Cahaya Tani	Ds.Legoksari Kec.Tlogomulyo	Pemula	Lanjut
16	KT Daun Mas	Ds.Tilir Kec.Tlogomulyo	Pemula	Lanjut
17	KWT Nurani	Ds.Wonocoyo Kec.Wonoboyo	Pemula	Lanjut
18	KT Ngudi Lestari	Ds.Pateken Kec.Wonoboyo	Pemula	Lanjut
19	KT Wijaya Kusuma	Ds.Tawang Sari Kec.Wonoboyo	Pemula	Lanjut
20	KT Among Tani III	Ds.Giripurno Kec.Ngadirejo	Lanjut	Madya
21	KWT Sekar Jaya	Ds.Katekan Kec.Ngadirejo	Lanjut	Madya
22	KWT Anggrek	Kel.Mangsong Kec.Ngadirejo	Awal	Pemula
23	KT Ngudi Rahayu	Ds.Kenteng Sari Kec.Candiroto	Awal	Pemula
24	KT Ngudi Makmur	Ds.Muneng.Kec.candiroto	Pemula	Lanjut
25	KT Margo Rukun	Ds.Gentan Kec.Kranggan	Pemula	Lanjut
26	KT Sejahtera	Ds.Klepu Kec.Kranggan	Pemula	Lanjut
27	KT Sari Makmur	Ds.Rejosari Kec.Pringsurat	Awal	Pemula
28	KT Rukun Bahagia	Ds.Nglorog Kec.Pringsurat	Pemula	Lanjut
29	KT Madyo Wono	Ds.Pingit Kec.Pringsurat	Pemula	Lanjut
30	KT Sumber Rejeki	Ds.Wonotirto Kec.Bulu	Pemula	Lanjut
31	KT Jaya Mukti	Ds.Pakurejo Kec.Bulu	Pemula	Lanjut
32	KT Taruna Tani Tunas Harapan	Ds.Bonjor Kec.Tretep	Pemula	Lanjut
33	KT. Brem Jaya	Ds. Campurejo Kec. Tretep	Pemula	Lanjut
34	KT.Lereng Mulyo	Ds.Tempelsari Kec.Tretep	Pemula	Lanjut
35	KT.Ngudi Rukun	Ds Jambon Kec.Gemawang	Pemula	Lanjut
36	KT.Maju Lancar	Ds.Kemiriombo Kec.Gemawang	Pemula	Lanjut
37	KT. Karya Manunggal	Ds.Drono Kec.Tembarak	Pemula	Lanjut
38	KT. Jaya Sentosa	Ds.Botoputih Kec.Tembarak	Pemula	Lanjut
39	KT. Jetis Makmur	Ds.Menggoro Kec.Tembarak	Pemula	Lanjut
40	KT.Harapan Maju	Ds.Tleter Kec.Kaloran	Awal	Pemula
41	KT.Sido Dadi	Ds.Tegowanuh Kec.Kaloran	Pemula	Lanjut
42	KT.Sijoho	Ds.Gentingsari Kec.Bansari	Awal	Pemula
43	KT.Margo Raharjo Tiga	DS.Mojosari Kec.Bansari	Pemula	Lanjut

44	KT.Karya Tani	Ds.Tuksari Kec.Kledung	Awal	Pemula
45	KT. Barokah Makmur Mandiri	Ds.Kledung Kec.Kledung	Awal	Pemula

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja DKPPP dari 33 indikator semua mencapai target 100 %,
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP, antara lain :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kesejahteraan Petani, Peternak Dan Pelaku Usaha Perikanan Masih Rendah	Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Masih Rendah	Masih Adanya Potensi Kerawanan Pangan
		Ketersediaan Pangan Pokok Fluktuatif
		Kurangnya budidaya pertanian dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP (Good Agriculture Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Handling practice), GBP (Good Breeding Practice), GFP (Good Farming

		Practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Rendahnya penyediaan dan pemanfaatan prasarana pertanian
		Perubahan Iklim
		Adanya serangan hama penyakit yang belum tertangani
		Rasio jumlah PPL dan kelompok tani yang masih kurang
		Menurunnya daya dukung lingkungan
		Penerapan standar budidaya perikanan yang belum sesuai SOP, CBIB, CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Ketersediaan ikan edemik di perairan umum kurang
		Fluktuasi harga saprodi pertanian dan perikanan
	Rendahnya mutu hasil pertanian dan perikanan	Mutu pangan segar asal tumbuhan yang belum memenuhi standart keamanan pangan
		Adanya penyakit hewan yang belum tertangani dan

		masih adanya produk dan bahan asal hewan yang belum memenuhi standart ASUH
		Budidaya pertanian dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, HACCP (Hazard Analisis critical control point), GVP(Good veteryner practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan

Memperhatikan isu-isu penting tersebut di atas dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, maka dalam jangka pendek kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung difokuskan pada:

1. Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan
2. Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat
3. Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi
4. Optimalisasi produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan

5. Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan
6. Penguatan kelembagaan petani
7. Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
8. Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
9. Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil
11. Peningkatan ketersediaan induk ikan, benih ikan dan pakan ikan dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau
12. Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya
14. Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak
15. Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan
16. Meningkatkan persentase penebaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)
17. Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian
18. Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian
19. Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian
20. KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu
21. Penguatan SDM dan kelembagaan petani

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu sejumlah 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2. Terdapat pengurangan pagu pada sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - g. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- i Pemeliharaan Mebel
- j Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- k Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- m Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- n Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- o Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- p Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- q Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- r Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- s Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- t Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- u Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- v Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- w Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
- x Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- y Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- z Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- aa Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
- bb Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- cc Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- dd Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- ee Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- ff Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.34
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN RENJA KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025			HASIL PENETAPAN		
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	74.086.150.797		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77.165.785.861
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.063.893.754	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.978.893.754	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.380.893.754
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994,00	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.430.000.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000.000
	Pengadaan Mebel	250.000.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30000000			
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.944.504.760	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.911.504.760
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.802.004.760		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.780.004.760

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000
	Pemeliharaan Mebel	20.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.000.000	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.000.000
a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.000.000	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000
a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	290.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	120.000.000	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.000.000
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30000000	a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	30000000		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	90.000.000		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	40.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	235.000.000
a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0	a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	40.000.000	b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10000000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-
a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	110.000.000	7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.000.000
a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.000.000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.732.257.043		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.509.892.107
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.757.201.143	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.460.436.207
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.507.201.143	a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.807.159.707
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.407.201.143		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.231.159.707
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.576.000.000
b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.653.276.500
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	150.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.643.276.500
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	100.000.000		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.203.330.900	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.047.230.900
a	Pengembangan Prasarana Pertanian	175.000.000	a	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.500.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	175.000.000		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-
b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.028.330.900	b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.022.730.900
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	867.705.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	836.605.000
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	135.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.078.915.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.999.415.000
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.081.710.900		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.051.710.900
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	771.725.000	10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	651.725.000
a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	671.725.000	b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	591.725.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	671.725.000		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	591.725.000
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000	11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000
a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	550.000.000	a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	500.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000.000		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	450.000.000	12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	350.000.000
a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	450.000.000	a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.000.000
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)

	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0
--	---	-------------	--	---	---

Sumber : DKPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat ditampung melalui mekanisme musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, dan pada tahun 2026 tidak terdapat usulan musrenbang untuk urusan pangan, pertanian dan perikanan

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Smart Farming	DKPPP, KT< KWT, Gapoktan	Swadaya, APBN	Fasilitasi mekanisme pertanian modern, dari hulu sampai hilir	Fasilitasi mekanisme pertanian modern, dari hulu sampai hilir	Meningkatnya produksi komoditas pertanian <ul style="list-style-type: none">Meningkatnya nilai ekonomi komoditas pertanian	2021-2023
2	Simbakorn	DKPPP	-	Aplikasi CPCL	Database bantuan semua sumber anggaran	Meningkatnya manajemen CPCL, mengurangi duplikasi bantuan	2023
3	Bawang Geol Agribun	BRIN, DKPPP	-	Penelitian vareistas bawang local unggul	Varietas Bawang Lokal Unggul	Peningkatan produktivitas bawang local unggul	2023
No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
4	Kemloko 7-8	BRIN, DKPPP	APBD	Penelitian varietas tembakau local unggul	Varietas tembakau local tahan penyakit lincat	Peningkatan produktivitas tembakau local unggul	DKPPP 2023
5	Simpel	DKPPP	APBD		Aplikasi untuk sinkronisasi data penggunaan lahan	Sinkronisasi data penggunaan lahan dengan eksisting2	2024

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ada 23 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I dalam Lomba Penerapan Hygiene sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan Tingkat Provinsi Jawa TengaholehCV Sumber Gizi Desa Kedu Kecamatan Kedu	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
2	Petani cabai terbaik (Siswanto Food Estate Kec. Bansari) dari Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
3	Kategori Petani (Hendi Nur Seto) dari Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
4	Perempuan berjasa dan berprestasi bidang pertanian Tingkat Jawa Tengah (Poniyah, KWT Pelangi Rukun santoso desa Kaloran Kec Kaloran)	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
5	Zero Konsumsi dan Peredaran Daging Anjing dari Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
6	Juara I dan II Tembakau Lembutan di Soropadan Agro Festivasl kategori Tegal	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Regional	DKPPP
7	Juara I, II dan III Tembakau Lembutan di Soropadan Agro Festivasl kategori Tegal	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Regional	DKPPP
8	Juara 2 Tingkat Nasional Kelas Pejantan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama Kelompok Cabe Farm Desa Tretep Kecamatan Tretep	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
9	Juara 3 Tingkat Nasional Kelas Anakan Indukan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama kelompok Jalu farm Desa kertosari Kec Jumo	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP

10	Juara I Kelompok Tani ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, atas nama KTT Taruna Tani Karya Mudha	Gubernur	Provinsi	DKPPP
11	Pembina Kelompok Ekonomi Peternak Terbaik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
12	Kabupaten dengan Serapan Terbanyak pada vaksinasi PMK komoditas Kambing dan Domba	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
13	Predikat Sangat Baik, dalam Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Pangan Segar OKKPD Provinsi Jawa Tengah	Badan Pangan Nasional	Provinsi	DKPPP
14	Kabupaten Dengan Administrasi Kegiatan Terbaik	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
15	Juara I Penerap GAP Tembakau	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
16	Insan Perkebunan Tembakau Jawa Tengah	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
17	Juara 1 Lembutan Gunung Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
18	Juara 2 Lembutan Gunung Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
19	Juara 3 Lembutan Gunung Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
20	Juara 1 Lembutan Tegal Festival Lembutan Jateng Agro	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Provinsi	DKPPP

	Expo	Provinsi Jawa Tengah		
21	Juara 2 Lembutan Tegalan Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
22	Juara 3 Lembutan Tegalan Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP
23	Juara 1 Lembutan Sawah Festival Lembutan Jateng Agro Expo	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DKPPP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan Nasional dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung pada urusan Pangan, Perikanan dan Pertanian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan DKPPP yang dirumuskan dalam Renstra DKPPP 2025-2029 adalah “Terpenuhinya Kebutuhan Pangan” dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan;
- b. Meningkatnya produksi perikanan;
- c. Meningkatnya Produksi Pertanian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKPPP, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja DKPPP .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DKPPP Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan

3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DKPPP Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(06)	
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan					Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	
		Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	
						Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	

					2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat		2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat		2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase penanganan kerawanan pangan	
				Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	
					2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	
				Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan dengan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan peningkatan aksesibilitas pangan	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan			2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	
		Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
				2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
	Meningkatnya produksi perikanan				Angka Konsumsi Ikan	
					Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
		Terlaksanannya pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(06)	
					3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	
				Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
					3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
					3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
					3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
					3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya				
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	

					3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
					3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	
					3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	
			Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan		3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan ikan	
		Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	
			3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	
	Meningkatnya Produksi Pertanian			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	
				Rasio PDRB Sektor Pertanian	
				Persentase kinerja realisasi pupuk	
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun	
	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi	

					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas jagung	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas bawang putih	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas bawang merah	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas cabai rawit	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas cabai keriting	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tembakau	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas kopi robusta	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas kopi arabika	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi ternak unggas	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi telur	

					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi daging ternak besar	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi daging ternak kecil	
					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelahiran pedet	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

				3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	
				3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana yang digunakan	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola
					3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

					Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(06)	
					3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
					3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	
					3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	

				3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan penyakit hewan	
				3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	
	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular			3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	
				3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	

				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	
					3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	
					3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	
					3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani		3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	
					3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kenaikan kelas kelompok tani	
				Terlaksananya penyuluhan pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	
					3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
					3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
					3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	
					3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	
					3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publi				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	
			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Jumlah laporanÂ administrasi keuanganÂ perangkat daerah yang tersedia	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
			2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

					2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
					2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
					2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
					2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	

					2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
					2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

					2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
					2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
					2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(06)	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
					2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
					2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
					2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

					2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber : Renstra DKPPP Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi DKPPP Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DKPPP Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DKPPP Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA KAB TEMANGGUNG TAHUN 2026		RKPD KAB TEMANGGUNG TAHUN 2026	
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.636.150.558	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.135.563.648
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994
Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.199.261.564	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.174.654
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.067.761.564	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.395.674.654
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.421.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.271.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	70.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	470.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	350.000.000
		Pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	350.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.000.000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000

		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000

Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN	65.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN	610.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	50.000.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	250.000.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	220.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	210.000.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	30.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	20.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	260.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	250.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	250.000.000

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.615.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.987.501.407
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.180.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.147.681.407
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	820.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.373.681.407
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	120.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	11.993.681.407

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	700.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.380.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	360.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.774.000.000
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	350.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6.749.000.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	25.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	215.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.625.000.000
Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	90.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	90.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	185.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.535.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	490.888.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	125.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.950.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	50.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.059.112.000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	10.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	35.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	647.300.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	497.300.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	-	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	497.300.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.000.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	70.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.517.520.000

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	70.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000
3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	70.000.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	70.000.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.800.000.000
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	647.520.000
	26.386.150.558		57.203.065.055

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penambahan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 30.816.914.497. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja disebabkan karena penambahan pagu dari aspirasi bupati, aspirasi wakil bupati, program prioritas bupati serta sub kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik serta DBHCHT pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

5. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
6. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
7. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
9. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
10. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
11. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
12. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
13. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
14. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
15. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
16. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
17. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
18. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

- 19. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 20. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 21. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 22. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 23. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

Tabel 4.2
 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung
 Tahun 2026

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD		
Pemerintahan Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2026												
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan												
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan												
Kode		Uraian				Sumber Dana		Lokasi		Jumlah		
										Tahun - 1	Tahun N	Tahun + 1
											Jumlah (Rp)	
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							

2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	09	02	2,01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					
2	09	03	2,04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.000.000	Rp. 75.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					
2	09	04	2,01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000	

2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	09	04	2,02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					
2	09	05	2,01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	09	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.029.388.994	
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	09	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000	

2	09	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000	
2	09	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000	
2	09	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000	
2	09	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.500.000	
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	09	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000	
2	09	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000	
2	09	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.395.674.655	

2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	09	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000	
2	09	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000	
2	09	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.100.000.000	Rp. 125.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
3	25	03	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					

3	25	04	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 210.000.000	Rp. 50.000.000
3	25	04	2,02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000	
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
3	25	04	2,04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
3	25	05	2,01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					

3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					
3	25	06	2,01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 141.500.000	Rp. 10.000.000
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
3	25	06	2,03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
3	27	02	2,01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.993.681.407	Rp. 300.000.000
3	27	02	2,01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.380.000.000	Rp. 200.000.000
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					

3	27	02	2,02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.749.000.000	
3	27	02	2,02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian					
3	27	03	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000	
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian					
3	27	03	2,02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 490.888.000	Rp. 500.000.000
3	27	03	2,02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa		Rp. 1.450.000.000	
3	27	03	2,02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.059.112.000	Rp. 500.000.000

3	27	03	2,02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000	Rp. 10.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					
3	27	04	2,01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000	
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					
3	27	04	2,03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 497.300.000	Rp. 150.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					

3	27	05	2,01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
3	27	07	2,01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.800.000.000	Rp. 2.800.000.000
3	27	07	2,01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 647.520.000	Rp. 647.520.000
3	27	07	2,01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000	
Jumlah									Rp. 56.423.065.056	Rp. 5.392.520.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DKPPP untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DKPPP Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DKPPP itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DKPPP dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DKPPP Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DKPPP Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 DKPPP mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. **25.405.198.558** yang terdiri dari 11 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
Program Penyuluhan Pertanian.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DKPPP Tahun 2026 ini, maka harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DKPPP dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 18 Juli 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB
TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP. MS.i

Pembina Utama Muda

NIP. 197106301998031005